

# MODEL PEMBANGUNAN KOLABORATIF PENGLOLAAN POTENSI UNGGULAN DI PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL (PKSN) KAWASAN PERBATASAN LAUT

Dra. FARIDA KURNIANINGRUM, MM  
ASISTEN DEPUTI POTENSI KAWASAN PERBATASAN LAUT  
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN



*Farida  
Kurnianingrum*



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PROYEK PERUBAHAN  
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II**

**MODEL PEMBANGUNAN KOLABORATIF  
PENGELOLAAN POTENSI UNGGULAN  
DI PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL (PKSN)  
KAWASAN PERBATASAN LAUT**

**Disusun oleh:**

**Nama : Dra. FARIDA KURNIANINGRUM, MM**  
**NIP : 197211221992012001**  
**Jabatan : Asisten Deputi Potensi Kawasan  
Perbatasan Laut**  
**Instansi : Badan Nasional Pengelola Perbatasan**  
**Kelas/Kelompok : A/1**  
**Nomor Daftar Hadir : 35**  
**Angkatan : XXVIII**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2022**

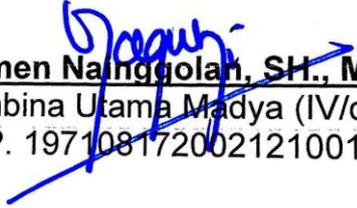
## LEMBAR PERSETUJUAN MENTOR

Nama Peserta : **Dra. Farida Kurnianingrum, MM**  
NDH : 35  
Instansi : Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Nama Mentor : **DR. Gutmen Nainggolan, SH., M.HUM**  
NIP : 197108172002121001  
Jabatan : Plh. Deputi Bidang Pengelola Potensi Kawasan Perbatasan pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan  
No. HP Mentor : 08111717871

Gagasan Proyek : **MODEL PEMBANGUNAN KOLABORATIF**  
Perubahan : **PENGELOLAAN POTENSI UNGGULAN DI PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL (PKSN) KAWASAN PERBATASAN LAUT**

Disetujui:  
Mentor,

  
**DR. Gutmen Nainggolan, SH., M.HUM**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 197108172002121001

## LEMBAR PERSETUJUAN PROYEK PERUBAHAN

JUDUL : MODEL PEMBANGUNAN KOLABORATIF  
PENGELOLAAN POTENSI UNGGULAN DI  
PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL  
(PKSN) KAWASAN PERBATASAN LAUT  
NAMA : Dra. FARIDA KURNIANINGRUM, MM  
NIP : 197211221992012001  
PANGKAT/GOLONGAN : Pembina Tk. I (IV/b)  
INSTANSI : Badan Nasional Pengelola Perbatasan  
JABATAN : Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan  
Laut  
KELAS/KELOMPOK : A/1  
NOMOR DAFTAR HADIR : 35

Disetujui diseminarkan pada Seminar Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Angkatan XXVIII pada tanggal 7 Desember 2022 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

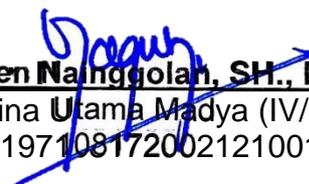
Jakarta, 6 Desember 2022

**Coach**

**Mentor**

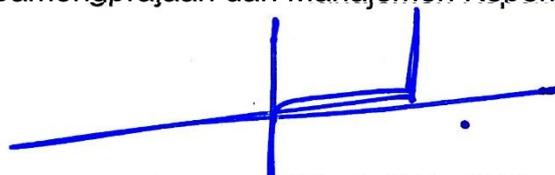


**Drs. Machmudan Sadiq, MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197103051992021002



**DR. Guftmen Nainggolan, SH., MLHUM**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 197108172002121001

Mengetahui:  
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi  
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan



**Mohammad Rizal, S.E., M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196408171993031001

## BERITA ACARA SEMINAR PROYEK PERUBAHAN

Pada hari : Rabu  
Tanggal : 7 Desember 2022  
Pukul :  
Tempat : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kementerian Dalam Negeri

Telah diseminarkan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Angkatan XXVIII

JUDUL : Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Laut  
DISUSUN OLEH : Dra. FARIDA KURNIANINGRUM, MM  
JABATAN : Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut  
KELAS/KELOMPOK : A/1  
NOMOR DAFTAR HADIR : 35

Dan telah mendapatkan pengujian/saran/masukan/komentar dari Penguji, *Mentor*, dan *Coach*.

**Coach**



**Drs. Machmudan Sadiq, MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197103051992021002

**Peserta**



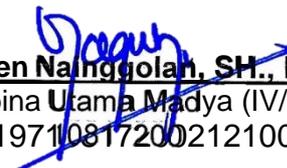
**Dra. Farida Kurnianingrum, MM**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 197211221992012001

**Penguji**



**Dr. Rochayati Basra, M.Pd**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196710312001122001

**Mentor**

  
**DR. Gutmen Nanggolah, SH., MHUM**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 197108172002121001

Mengetahui:

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi  
Kepamongpraajaan dan Manajemen Kepemimpinan



**Mohammad Rizal, S.E., M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196408171993031001

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala tuntunannya, penulis dapat menyelesaikan Proyek Perubahan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Laut sebagai pemenuhan tugas pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, yang selanjutnya mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, merupakan momentum yang perlu disambut dan didukung oleh semua pihak baik pemerintah pusat, pemda, swasta, maupun *stakeholders* yang lain. Dalam perjalanannya, BNPP telah melakukan sejumlah kebijakan dan program-program percepatan pengelolaan dan pembangunan perbatasan negara, namun harus diakui berbagai macam kegiatan tersebut masih belum optimal.

Salah satu penyebabnya adalah belum adanya suatu Model Pembangunan kolaboratif yang efektif, dan mampu memperkuat fungsi integrasi dan sinergitas kebijakan, dan sinkronisasi rencana aksi kementerian mitra kawasan perbatasan laut secara kolaboratif sebagai tindaklanjut dari Renduk BWN-KP Tahun 2020-2024. Model dimaksud merupakan sebuah instrumen yang mampu secara teknis, mendorong integrasi, sinergitas dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan baik oleh Kementerian/Lembaga anggota BNPP yang memiliki keterkaitan dalam pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut itu sendiri, maupun oleh Kementerian/Lembaga lain yang juga langsung terkait dengan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan laut, serta Pemerintah Daerah perbatasan. Mengingat dengan kontruksi dan desain kebijakan pasal 15 UU Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, *output* dan *outcome* kinerja BNPP prosentase besarnya lebih ditentukan oleh kinerja Kementerian terkait.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membimbing, membantu dan memberikan kesempatan, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Proyek Perubahan, kepada:

1. DR. Gutmen Nainggolan, SH., M.HUM, selaku Plh. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai **Mentor** yang telah memberikan arahan dan bimbingannya;
2. Mohammad Rizal, S.E., M.Si, selaku Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan;
3. Drs, Machmudan Sadiq, MM., selaku **Coach** yang telah memberikan arahan dan bimbingannya;
4. Bapak/Ibu tenaga Pengajar/Widyaiswara dari Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama penulis mengikuti pelatihan ini;
5. Bapak/Ibu pejabat dan panitia pelaksana kegiatan PKN Tingkat II Angkatan XXVIII dari Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongan dan Kepemimpinan, BPSDM Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan bantuan, fasilitasi dan dukungan dalam pelaksanaan PKN Tingkat II ini;
6. Rekan kerja Kedeputan Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan dan Keasdepan Potensi Kawasan Perbatasan Laut; dan
7. Seluruh rekan peserta PKN Tingkat II Angkatan XXVIII atas energi positifnya dalam kebersamaan, saling mendukung dan memotivasi untuk kesuksesan bersama.

Besar harapan penulis, semoga dengan penyusunan Proyek Perubahan ini memberikan nilai tambah dan manfaat untuk pelaksanaannya lebih lanjut. Penulis pun menyadari adanya keterbatasan penulis dalam menyusunnya dan masih jauh dari sempurna. Besar harapan penulis atas saran dan masukan yang menjadikan lebih baik lagi.

Jakarta, 6 Desember 2022



**Dra. FARIDA KURNIANINGRUM, MM**

NIP. 197211221992012001

## EXECUTIVE SUMMERY

*Presence of a Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara-Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 based on Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2022 is a bright spot to ensure commitment between interested parties in following up according to predetermined targets, including regarding designing and/or developing superior potential in the PKSN in the Sea Border Area through the Action Plan of the National Border Management Agency which has been mutually agreed upon.*

*Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Laut becomes something needs for the holders interest in take role in effort strengthening management border area potential executed sea in a manner holistic, integrative, thematic, and spatial as well as based participation stakeholders interest with notice sustainability and continuity development border area economy sea.*

*4 ( four ) ministries partners Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut on Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasioanal Pengelola Perbatasan, namely Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Ketenagakerjaan, including related Ministries/Institutions others who have linkages in development economy in the border region sea, including Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, in arrange Plan Action in each year, and responses to implementation activities carried out need strengthened or not only limited in track coordination , is also required strengthening in a manner collaborative.*

*Linkages color pentahelix even necessary put forward in present and follow up policy development economic activities carried out in the relevant PKSN, and through the Collaborative Development Model this, connection role between party, fine Government, Government Province , Government District /City (incl District), and Village, so case party Academics, Business Players and Information Media woke up on approach Leveling and the Process Flow approach to the Collaborative Development Model meant, with show every detail of awakening stages.*

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN MENTOR .....	ii
FORMULIR PERSETUJUAN COACH .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PROYEK PERUBAHAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
EXECUTIVE SUMMERY .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
BAB I RENCANA PROYEK PERUBAHAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.1.1. Struktur Organisasi BNPP .....	3
1.1.2. Visi dan Misi .....	6
1.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Nasioal Pengelola Perbatasan dan Asisten Deputi Kasawan Perbatasan Laut .....	7
1.1.4. Sumberdaya Manusia .....	9
1.1.5. Kondisi dalam Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut .....	10
1.1.6. Analisa dan Masalah .....	11
1.1.7. Peran Kementerian/Lembaga Mitra Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut .....	16
1.1.8. Inovasi .....	17
1.1.9. Alur Pikir .....	18
1.2. Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan .....	20
1.2.1. Tujuan Proyek Perubahan .....	20
1.2.1. Manfaat proyek perubahan .....	22
1.3. Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil) .....	23
1.3.1. <i>Output</i> (Keluaran) dan <i>Outcome</i> (Hasil) .....	23
1.3.1. <i>Outcome</i> (Dampak) .....	23
1.4. Tahapan Perubahan Rencana Strategis .....	24
1.4.1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan ( <i>milestone</i> ) .....	24
1.5. Rencana Strategi Marketing .....	24
1.5.1. Identifikasi dan Analisa <i>Stakeholders</i> .....	28
1,5,2, Strategi Komunikasi/Mobilisasi <i>Stakeholdes</i> .....	30
1.6. Identifikasi Potensi Kendala dan Solusinya .....	32
1.6.1, Identifkasi Potensi Kendala dan Masalah .....	32
1.6.2. Mengatasi Kendala .....	32

1.7.	Faktor Kunci Keberhasilan Proyek Perubahan .....	33
1.8.	Tata Kelola Proyek Perubahan .....	33
1.8.1	Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan .....	33
1.8.2.	Struktur Organisasi Pelaksana dan Tim Kerja .....	34
1.8.3.	Struktur Tata Kelola Proyek Perubahan .....	38
1.8.4.	Tugas dan Kewenangan Tim Efektif .....	39
1.8.5.	Masa Berlaku dan Etika serta Mekanisme Tim Efektif .....	42
1.8.6.	Monitoring dan Evaluasi .....	42
1.9.	Rencana Pengembangan Potensi Diri Sebagai Tindak Lanjut dari <i>Self Assessment</i> . .....	42
1.9.1.	Hasil Identifikasi Pengembangan Potensi Diri .....	43
1.9.2.	Rencana Pengembangan Potensi Diri .....	44
BAB II	PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN .....	46
2.1.	Capaian Tahapan Rencana Strategis .....	47
2.1.1,	Membangun Tim Proyek Perubahan .....	47
2.1.2.	Identifikasi Potens dan Masalah di PKSN Kawasan Perbatasan laut .....	53
2.1.3.	Penguatan Bahasan Lainnya mengeia Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut melali Kegiatan pendukung .....	64
2.1.4.	Penyusunan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut .....	68
2.2.	Implementasi Strategi Marketing .....	70
2.3.	Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran .....	71
BAB III	PENUTUP .....	73
3.1.	<i>Lesson Learnt</i> .....	73
3.2.	Kesimpulan .....	74
3.3.	Saran .....	74

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Wilayah Perbatasan Laut Negara Kesatuan Republik Indonesia .....	1
Gambar 1.2.	Struktur Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan .....	4
Gambar 1.3.	Masalah Prioritas .....	12
Gambar 1.4.	Alur Proses Penyusunan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKS N Kawasan Perbatasan Laut .....	19
Gambar 1.5.	Kelompok <i>Stakeholders</i> sesuai kategorinya .....	28
Gambar 1.6	Strategi Komunikasi/Mobilisasi <i>Stakeholders</i> .....	29
Gambar 1.7.	Strategi Marketing Proyek Perubahan .....	30
Gambar 1.8.	Struktur Tata Kelola Manajemen Perubahan .....	38
Gambar 2.1.	Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 35.04-235 Tahun 2022 Tim Kerja Proyek Perubahan Penyusunan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Laut .....	48
Gambar 2.2.	Konsultasi dengan <i>Mentor</i> .....	53
Gambar 2.3.	Bimbingan dan Konsultasi dengan <i>Coach</i> .....	53
Gambar 2.4.	Konsolidasi Internal Keasdepan Potensi Kawasan Perbatasan Laut .....	53
Gambar 2.5.	Identifikasi untuk PKS N Sabang dan PKS N Rinai .....	54
Gambar 2.6.	Identifikasi untuk PKS N Tahuna dan PKS N Saumlaki .....	54
Gambar 2.7.	Identifikasi untuk PKS N Nunukan dan PKS N Daruba.....	55
Gambar 2.8.	Identifikasi untuk PKS N Bengkalis .....	56
Gambar 2.9.	Peta Wlayah Pengelolaan Perikanan (WPP) .....	58
Bambar 2.10.	Penyusunan Renaksi Tahun 2022	65
Gambar 2.11	Usulan Program kegiatan pada Gerbang Duta Tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Talaud .....	66
Gambar 2.12.	Pengembangan Ekonomi di Kabupaten Bengkalis	67
Gambar 2.1.3.	Pembahasan dan Finalisasi Model Pembangunan Kolaboratif	69
Gambar 2.14.	Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di kawasan Perbatasan Laut.	70



# BAB I

## RENCANA PROYEK PERUBAHAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki perairan yang luasnya hamper 2/3 luas wilayahnya, antara **pulau** satu dengan **pulau** yang lain disatukan oleh laut. Panjang batas darat dengan ketiga negara adalah  $\pm 3.151$  km, sementara panjang garis pantai batas laut adalah  $\pm 99.093$  km dengan jumlah Pulau- Pulau Kecil Terluar/Terdepan berjumlah 111 pulau Secara geografis, Indonesia berbatasan darat dan laut dengan 10 (sepuluh) negara, yaitu India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Republik Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Selain itu, letak geografis Indonesia pada posisi silang 2 (dua) benua, Asia dan Australia, dan 2 (dua) samudera, Samudera Pasifik dan Samudera Hindia menempatkan posisi Indonesia memiliki nilai strategis dalam percaturan geostrategis, baik dalam tataran global maupun regional Asia Pasifik, khususnya konsentrik Asia Tenggara, sebagaimana gambar di bawah ini:

**Gambar 1.1.**  
Wilayah Perbatasan Laut Negara Kesatuan Republik Indonesia



Posisi strategis semakin bertambah dengan besarnya potensi sumber daya alam dan jumlah penduduk yang nomor 4 (empat) di dunia. Kondisi eksisting ini, di satu sisi memberikan peluang yang besar dalam pembangunan kawasan perbatasan, tetapi di sisi lain memberikan kerentanan terhadap berbagai ancaman dalam semua aspek kehidupan.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kawasan perbatasan Indonesia, khususnya di kawasan perbatasan laut memiliki keanekaragaman potensi sumber daya alam yang cukup besar, baik di sektor kelautan perikanan, pertanian/perkebunan, dan pariwisata bahari. Namun demikian, potensi sumber daya tersebut belum sepenuhnya dikelola dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang mengamanatkan bahwa untuk mengelola batas wilayah negara dan mengelola kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelolaan Nasional dan Badan Pengelola Daerah.

Dan menjadi tantangan tersendiri dengan diterbitkannya Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP, sebagai dasar dari pembentukan BNPP yang memberikan wewenang yang terbatas pada perencanaan, koordinasi, dan evaluasi. Hal ini berimplikasi pada rentang kendali koordinasi yang dapat diterapkan oleh BNPP yang diharapkan dapat mengawal kawasan perbatasan sebagai:

1. Dimensi Batas Wilayah Negara (*Boundary Dimension*)

Memperkuat upaya penegakan kedaulatan negara serta penegakan pertahanan dan keamanan negara; dan

2. Dimensi Kawasan Perbatasan (*Frontier Dimension*)

Mendorong kesejahteraan melalui pendayagunaan sumberdaya dan pemerataan pembangunan.

Melalui RPJM tahun 2020-2024 dan Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Tahun 2020-2024, telah ditetapkan target-target area fokus pembangunan kawasan perbatasan. Untuk Lokasi Prioritas (LOKPRI) telah ditetapkan

222 (dua ratus dua puluh dua) kecamatan di 54 (lima puluh empat) kabupaten/kota pada 15 (lima belas) provinsi. Di samping itu, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) merupakan kebijakan strategis pemerintah yang ditetapkan pada 18 (delapan belas) PKSN di 16 (enam belas) kabupaten/kota. Selanjutnya yang dalam rentang kendali koordinasi yang difasilitasi oleh keasdepan Potensi Kawasan Perbatasan Laut, yaitu 154 (seratus lima puluh empat) LOKPRI dan 8 PKSN di Kawasan perbatasan laut.

#### **1.1.1 Struktur Organisasi BNPP**

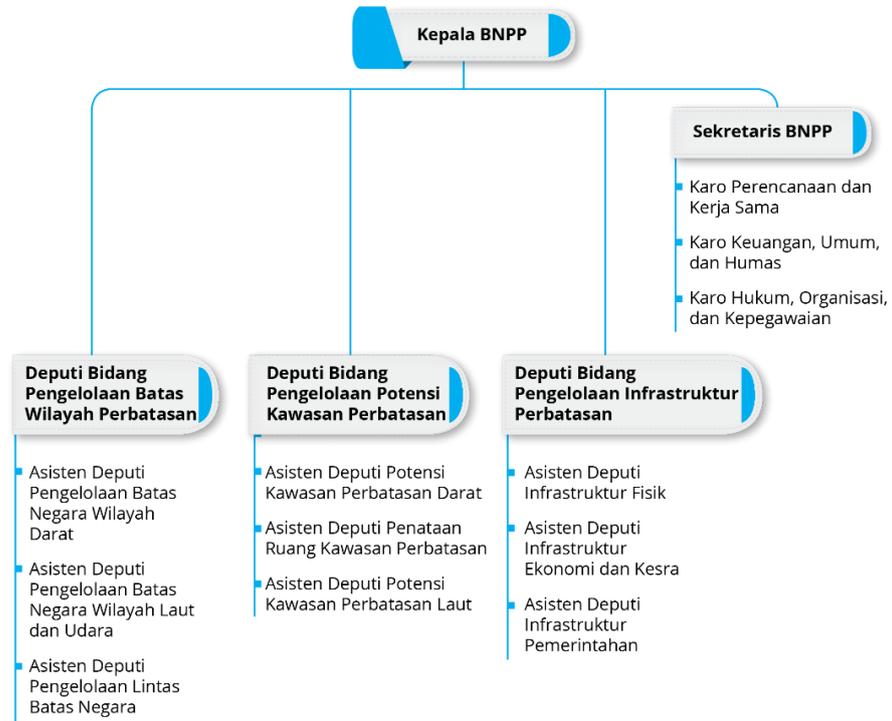
Unsur yang membentuk kerangka kelembagaan Pengelolaan BWN-KP adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Tetap BNPP;
- 2) Kementerian/Lembaga anggota BNPP dan non anggota BNPP;
- 3) Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- 4) Kelembagaan antarnegara.

BNPP merupakan badan koordinasi Pengelolaan BWN-KP yang beranggotakan 27 (dua puluh tujuh) Kementerian/Lembaga dan Gubernur yang memiliki wilayah perbatasan. BNPP dikepalai Menteri Dalam Negeri berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 Pasal 1 angka 5 jo. dan Pasal 10, di daerah juga terdapat BPPD, yakni perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota:

**Gambar 1.2.**

Struktur Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan



Hubungan koordinasi antara BNPP dan anggotanya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, sebagai berikut:

1. Pengarah BNPP,
2. Ketua Pengarah: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan,
3. Wakil Ketua Pengarah: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
4. Wakil Ketua Pengarah: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,
5. Wakil Ketua Pengarah: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Sumber Daya,
6. Anggota terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) Kementerian/ Lembaga, 15 (lima belas) Provinsi dan 54 (lima puluh empat) Kabupaten/Kota di Kawasan Perbatasan Negara, sebagai berikut:

**Tabel 1.1.**  
Kementerian/Lembaga terkait dalam Koordinasi BNPP

NO		KEMENTERIAN/LPNK	
1	LUAR NEGERI	15	KELAUTAN DAN PERIKANAN
2	PERTAHANAN	16	DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
3	HUKUM DAN HAM	17	AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL / ATR/BPN
4	KEUANGAN	18	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BAPPENAS
5	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	19	BADAN USAHA MILIK NEGARA/ BUMN
6	KESEHATAN	20	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH/KUKM
7	PERINDUSTRIAN	21	TENTARA NASIONAL INDONESIA/TNI
8	PERDAGANGAN	22	POLISI REPUBLIK INDONESIA/ POLRI
9	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL/ESDM	23	BADAN INTELEJEN NEGARA/BIN
10	PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT/PUPR	24	BADAN NARKOTIKA NASIONAL/ BNN
11	PERHUBUNGAN	25	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL/ BIG
12	KOMUNIKASI DAN INFORMASI/KOMINFO	26	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME/ BNPT
13	PERTANIAN	27	BADAN KEAMANAN LAUT/ BAKAMLA
14	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN/LHK		

**Tabel 1.2.**  
Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait di Kawasan Perbatasan Negara yang dalam Koordinasi BNPP

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4
1	ACEH	1	ACEH BESAR
		2	KOTA SABANG
		3	KOTA LANGSA
2	SUMATERA UTARA	4	SERDANG BEDAGAI
		5	BATU BARA
3	RIAU	6	BENGKALIS
		7	ROKAN HILIR
		8	MERANTI
		9	DUMAI
4	KEPULAUAN RIAU	10	BINTAN

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		11	KARIMUN
		12	NATUNA
		13	KEPULAUAN ANAMBAS
		14	BATAM
<b>5</b>	KALIMANTAN BARAT	15	SAMBAS
		16	SANGGAU
		17	SINTANG
		18	KAPUAS HULU
		19	BENGKAYANG
<b>6</b>	KALIMANTAN TIMUR	20	BERAU
<b>7</b>	KALIMANTAN UTARA	21	MALINAU
		22	MAHAKAM ULU
		23	NUNUKAN
<b>8</b>	NUSA TENGGARA TIMUR	24	KUPANG
		25	ALOR
		26	ROTE NDAO
		27	SABU RAIJUA
		28	MALAKA
		29	TIMOT TENGAH UTARA
		30	BELU
<b>9</b>	SULAWESI UTARA	31	KEPULAUAN SANGIHE
		32	KEPUALUAN TALAUD
		33	MINAHASA UTARA
		34	BOLAANG MONGONDOW UTARA
		35	KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
<b>10</b>	GORONTALO	36	GORONTALO UTARA
<b>11</b>	SULAWESI TENGAH	37	TOLI-TOLI
<b>12</b>	MALUKU	38	MALUKU TENGGARA
		39	KEPULAUAN TANIMBAR
		40	KEPUALUAN ARU
		41	MALUKU BARAT DAYA
<b>13</b>	MALUKU UTARA	42	HALMAHERA TENGAH
		43	MOROTAI
<b>14</b>	PAPUA BARAT	44	RAJA AMPAT
		45	TAMBRAW
<b>15</b>	PAPUA	46	MERAUKE
		47	BIAK NUMFOR
		48	MIMIKA
		49	SARMI
		50	KEEROM
		51	PEGUNUNGAN BINTANG
		51	PEGUNUNGAN BINTANG
		52	SUPIORI
		53	BOVEN DIGOEL

### 1.1.2. Visi dan Misi

Dalam koridor pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024, yaitu: Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan

berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. Selanjutnya Settap BNPP melalui **Visi** Tahun 2020-2024, yaitu: “Sekretariat Tetap BNPP yang berintegrasi, untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong di perbatasan negara.” Hal ini diperjelas pada **Misi** Settap BNPP yang relevan dengan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019-2024 pada misi yang ke-1,2,3 dan 7, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia,
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing,
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan, dan
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa.

#### **1.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Badan Nasional Perbatasan (BNPP) dan Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut**

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPP Nomor 5 Tahun 2017, BNPP mempunyai **tugas** Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan BWN-KP. Dan berfungsi:

- a. penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan BWN-KP;
- b. pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan BWN-KP;
- c. pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan BWN;
- d. inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan;

- e. penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di Kawasan Perbatasan;
- f. penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan BWN-KP sesuai dengan skala prioritas;
- g. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan BWN-KP.

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan merupakan satu dari tiga kedeputian yang ada di BNPP yang di antaranya memiliki tujuan, sasaran strategis, program dan sasaran program terkait pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut, sebagai berikut:

- a. Tujuan: terwujudnya wilayah perbatasan negara sebagai beranda depan melalui Pengelolaan BWN-KP yang holistik, integratif, serta berbasis partisipasi pemangku kepentingan;
- b. Sasaran strategis: Terwujudnya pengelolaan potensi unggulan yang berkesinambungan berbasis tata ruang di kawasan perbatasan darat dan laut;
- c. Program: Pengelolaan BWN-KP; dan
- d. Sasaran Program: Meningkatkan efektifitas pengelolaan potensi SDM dan Sumber Daya Alam di kawasan perbatasan laut.

Untuk mencapai hal tersebut di atas, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut memiliki **tugas** melaksanakan penyusunan dan perumusan Renduk dan Renaksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pemanfaatan, penegasan, pemeliharaan pengamanan, penyusunan anggaran, pengendalian pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut. Dan berfungsi:

- a. penyiapan penyusunan dan perumusan Renduk dan Renaksi serta pengoordinasian penyusunan;

- b. kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan laut;
- c. penyiapan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan;
- d. pemeliharaan, dan pengamanan Potensi Kawasan Perbatasan Laut;
- e. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan potensi Kawasan;
- f. perbatasan laut sesuai dengan skala prioritas; dan
- g. penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut.

#### 1.1.4. Sumberdaya Manusia

Pada Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut dari jumlah Aparatur Negeri Sipil (ASN) dan *supporting staf* sejumlah 20 (dua puluh) orang, diketahui kapasitas sumber daya yang ada, dengan memperhatikan tingkat pendidikan dan usia. Berikut adalah data pegawai dimaksud:

**Tabel 1.3.**

Daftar Pegawai di keasdepan Potensi Kawasan Perbatasan Laut

No	Nama	Jabatan	Status Staf	Tk. Peddk	Usia
1	Dra. Farida Kurnianingrum, MM	Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut	PNS	S-2	50
2	Drs. Sriyanto, M.Si	Perencana Ahli Madya, Koordinator Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi pada Asdep Potensi Kawasan Perbatasan Laut	PNS	S-2	57
3	Deki Sahputra, S.SiT, MT	Perencana Ahli Madya, Koordinator Bidang Perencanaan pada Asdep Potensi Kawasan Perbatasan Laut	PNS	S-2	44
4	Andrew FM. Lessil, S.STP, M.Si	Perencana Ahli Muda, Subkoordinator Bidang Perencanaan Anggaran pada Asdep Potensi Kawasan Perbatasan Laut	PNS	S-2	44
5	Susilawati, S.Pd	Perencana Ahli Muda, Subkoordinator Bidang Kebijakan Program pada Asdep Potensi Kawasan Perbatasan Laut	PNS	S-1	46
6	Hariman Latuconsina, S.STP	Perencana Ahli Muda, Subkoordinator Bidang Fasilitasi Pelaksanaan pada Asdep Potensi Kawasan Perbatasan Laut	PNS	S-1	40

1	2	3	4	5	6
7	Sumono, SH	Perencana Ahli Muda, Subkoordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi pada Asdep Potensi Kawasan Perbatasan Laut	PNS	S-1	57
8	Lismardiyah, S.Sos	JFU pada Asdep Potensi Kawasan Perbatasan Laut	PNS	S-1	40
9	Agung Arfian Adiutama, S.STP	JFU	PNS	S-1	26
10	Rohani Manurung, S.Ak	JFU	PNS	S-1	45
11	Grace Julyana, ST	JFU	PNS	S-1	31
12	Roy Shumadan L.Bancin, S.STP	JFU	PNS	S-1	27
13	M. Arbi Nugraha, SE	JFU	PNS	S-1	34
14	Wima Ayu Kristiana, A.P.Kb.N	JFU	PNS	D-1	23
15	Michael Delpopi	JFU	PNS	S-1	33
16	Andi Ichsan, SE	<i>Supporting Staf</i>	SS	S-1	47
17	Meytia Eka Safitri, S.Pi	<i>Supporting Staf</i>	SS	S-1	34
18	Ratih Dwijayanthi, S.Pd	<i>Supporting Staf</i>	SS	S-1	32
19	Nirma Listiana, S.Ikom	<i>Supporting Staf</i>	SS	S-1	34
20	Romadhani Syahputra, S.Pd	<i>Supporting Staf</i>	SS	S-1	27

### 1.1.5. Kondisi dalam Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut

Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut selama beberapa tahun ini belum terlaksana belum secara optimal sebagaimana yang diharapkan, sehingga dibutuhkan terobosan/inovasi untuk penguatannya.

Adapun **kondisi saat ini** yang berpengaruh dalam pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut, sebagai berikut:

1. Terbatasnya kapasitas dalam mengelola potensi sumber daya lokal;
2. Kebijakan pemerintah yang dinamis dan memiliki keterkaitan kuat antar Kementerian/Lembaga (PKSN, PLBN dan LOKPRI), namun perlu penguatan dalam pelaksanaannya;
3. Masih belum sepenuhnya terlaksana komitmen antar Kementerian/Lembaga terhadap renduk dan renaksi; dan

4. Pertumbuhan ekonomi pada kawasan perbatasan laut cenderung berjalan lambat, yang dikarenakan potensi unggulan belum dioptimalkan pemanfaatannya.

Selanjutnya sebagai **kondisi yang diharapkan** dalam pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut, yaitu:

1. Meningkatnya kapasitas dalam pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut;
2. Meningkatnya sinergitas peran antar para pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan dan/atau pengembangan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut;
3. Terlaksananya komitmen antar Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan laut; dan
4. Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan melalui pemanfaatan dan/atau pengembangan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut.

Memperhatikan hal tersebut, maka dibutuhkan suatu terobosan/inovasi untuk menjawab permasalahan belum optimalnya pemanfaatan dan/atau pengembangan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut dengan menghadirkan suatu Model Pembangunan yang adaptif, sehingga memberikan sinergitas peran antar pihak dalam pengelolaan potensi unggulan kawasan perbatasan laut yang diharapkan akan berimplikasi pada percepatan pembangunan ekonomi di lokasi PKSN kawasan perbatasan laut.

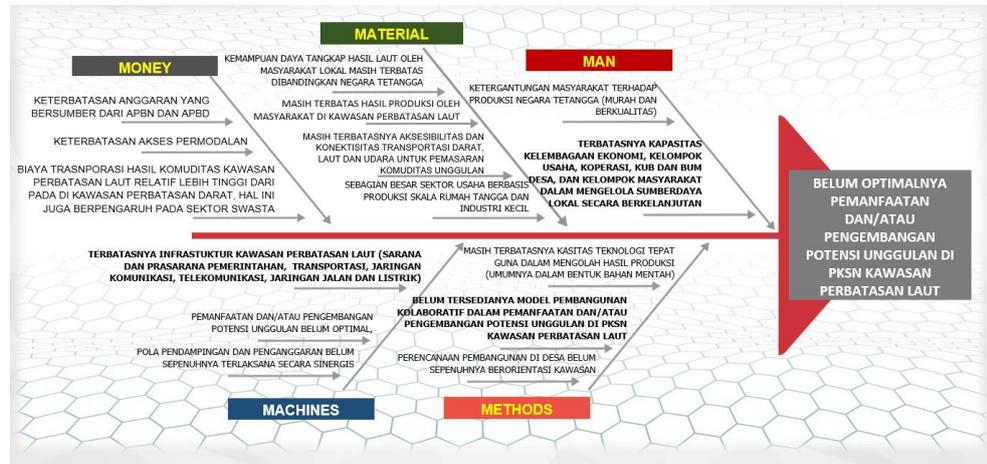
#### **1.1.6. Analisa Masalah**

##### **1. Analisis Masalah dan Penyebabnya**

*Fishbone*, metode analisis yang digunakan untuk menemukan akar penyebab masalah yang akurat. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi penyebab suatu masalah guna menemukan solusi yang tepat. Hal-

hal yang dialami terkait *man, material, money, methods,* dan *machines*, sebagai berikut:

**Gambar 1.3.**  
Masalah Prioritas



Sebagaimana gambar di atas dengan menggunakan analisis *fishbone* menjelaskan, bahwa terdapat 5 (lima) akar masalah yaitu *man, money, material, methods* dan *machines*, masing-masing menjelaskan hal yang menjadi penyebab dari belum optimalnya pemanfaatan dan/atau pengembangan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut.

Dari penyebab tersebut yang menjadi penyebab utama adalah:

- Terbatasnya kapasitas kelembagaan ekonomi, kelompok usaha, koperasi, kub dan bum desa, dan kelompok masyarakat dalam mengelola sumberdaya lokal secara berkelanjutan;
- Masih terbatasnya Model Pembangunan kolaboratif dalam pemanfaatan dan/atau pengembangan potensi unggulan pada kawasan perbatasan laut; dan
- Terbatasnya infrastuktur kawasan perbatasan laut (sarana dan prasarana pemerintahan, transportasi, jaringan komunikasi, telekomunikasi, jaringan jalan dan listrik.

## 2. Masalah Prioritas

berdasarkan analisis *Urgent/Seriousnes/Growth* (USG) yaitu metode skoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang

harus diselesaikan, dideskripsikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

**Tabel 1.4.**  
*Analisis Urgent/Seriousnes/Growth (USG)*

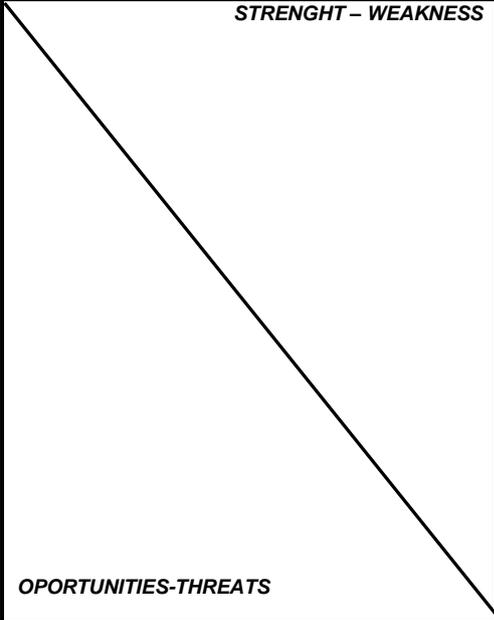
No.	Faktor Utama Permasalahan dalam Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut		U	S	G	Total
1	TERBATASNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI, KELOMPOK USAHA, KOPERASI, KUB DAN BUM DESA, DAN KELOMPOK MASYARAKAT DALAM MENGELOLA SUMBERDAYA LOKAL SECARA BERKELANJUTAN	AGENDA PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI BELUM OPTIMAL	4	4	4	12
		MASIH LEMAHNYA KAPASITAS DAYA BELI MASYARAKAT DI KAWASAN PERBATASAN LAUT	4	4	4	12
		BELUM SEPENUHNYA MENJAWAB PELUANG PASAR LOKAL MAUPUN KEBUTUHAN NEGARA TETANGGA	4	5	4	13
<b>Jumlah Bobot Penilaian</b>						<b>37</b>
No.	Faktor Utama Permasalahan dalam Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut		U	S	G	Total
2	MASIH TERBATASNYA MODEL PEMBANGUNAN KOLABORATIF DALAM PEMANFAATAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN PADA KAWASAN PERBATASAN LAUT	BELUM OPTIMALNYA SINERGITAS PERAN ANTAR PIHAK DALAM MELAKUKAN PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN LAUT	5	5	5	15
		BELUM OPTIMALNYA ALUR PROSES DALAM PENGELOLAAN PKPL	5	5	5	15
		ADANYA PELUANG BESAR YANG BELUM DIOPTIMALKAN PEMANFAATAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PERBATASAN NEGARA (PKSN, PLBN, LOKPRI)	5	5	5	15
<b>Jumlah Bobot Penilaian</b>						<b>45</b>
No.	Faktor Utama Permasalahan dalam Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut		U	S	G	Total
3	TERBATASNYA INFRASTRUKTUR KAWASAN PERBATASAN LAUT (SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN, TRANSPORTASI, JARINGAN KOMUNIKASI, TELEKOMUNIKASI, JARINGAN JALAN DAN LISTRIK	BELUM DIKETAHUI KONDISI EKSISTING YANG VALID ATAS KETERSEDIAANDAN KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR DI KAWASAN PERBATASAN LAUT	4	4	4	12
		KETERBATASAN ANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEMFASILITASI KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR	4	5	4	13
		BELUM OPTIMALNYA KOMITMEN K/L DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR	4	5	4	13
<b>Jumlah Bobot Penilaian</b>						<b>38</b>

Keterangan:

SKOR	KETERANGAN	NO	RANGKING
5	Sangat Penting	2	45
4	Penting	1	37
3	Netral	3	38
2	Tidak Penting		
1	Sangat Tidak Penting		

Memperhatikan hasil analisa USG pada tabel di atas, diketahui bahwa masih terbatasnya Model Pembangunan Kolaboratif dalam pemanfaatan dan/atau pengembangan potensi unggulan pada kawasan perbatasan laut di PKSN.

**Tabel 1.5.**  
Analisis SWOT

<p style="text-align: center;"><b>STRENGHT – WEAKNESS</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>OPORTUNITIES-THREATS</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>STRENGHT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kapasitas kuantitas dan kualitas SDM di Keasdepan PKPL yang cukup.</li> <li>2) Lingkungan kerja yang kondusif.</li> <li>3) Ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup.</li> <li>4) Memiliki peran besar dalam penyusunan kebijakan dan program; Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi; Monitoring dan evaluasi; serta pengawasan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>WEAKNESS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kewenangan BNPP untuk mengkoordinasikan K/L dan Pemda perbatasan negara belum sepenuhnya dapat mengikat/memaksa K/L untuk mengalokasikan program dan anggaran sesuai kebutuhan pembangunan Kawasan perbatasan negara.</li> <li>2) Keterbatasan waktu untuk berkonsolidasi, karena tingkat kesibukan dalam mendapatkan peran dari Kementerian/Lembaga terkait</li> <li>3) Anggaran terbatas sedangkan ruang lingkup kerja yang luas dan uasnya cakupan wilayah perbatasan negara dengan kondisi geografis yang ekstrim.</li> <li>4) Luasnya cakupan wilayah perbatasan negara dengan kondisi geografis yang ekstrim yang difasilitasi tidak diimbangi dengan ketersediaan standarisasi alat kerja untuk memperkecil risiko tugas</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>OPORTUNITIES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;</li> <li>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;</li> <li>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024</li> <li>4. Kebijakan Pemerintah pada kawasan perbatasan negara:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)</li> <li>b. 18 PLBN Terpadu:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan (INPRES No.1 tahun 2019) di 9 kabupaten.</li> <li>2) 7 PLBN terpadu telah dibangun dan sudah beroperasi (INPRES 6/2015) di 7 kabupaten.</li> </ol> </li> <li>c. 222 Kecamatan Lokasi Prioritas (LOKPRI)                 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) LOKPRI Laut (154 kecamatan)</li> <li>2) LOKPRI Darat (62 kecamatan)</li> <li>3) LOKPRI Dara/laut (3 kecamatan)</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>SO</b></p> <p>(Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan dengan memanfaatkan peluang)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. PENYUSUNAN MODEL PEMBANGUNAN KOLABORATIF POTENSI UNGGULAN DI PKSN KAWASAN PERBATASAN LAUT</li> <li>B. PENGUATAN DATA DENGAN MEMANFAATKAN HASIL KONSOLIDASI DATA SPASIAL BERBASIS DIGITALISASI PADA 154 KECAMATAN LOKPRI; DAN INDEKS PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN</li> <li>C. PENGUATAN PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM UPAYA PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN LAUT YANG SINERGIS ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>WO</b></p> <p>(Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan denagn memanfaatkan peluang)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. REVISI KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK PENGUATAN PERAN BNPP DALAM LINI KOORDINASI</li> <li>B. PENGUATAN KOMITMEN PERAN ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN ANTAR LEVEL PEMERINTAH,</li> <li>C. MEMASTIKAN PENYEDIAAN KETERSEDIAAN ALAT KERJA YANG TERSTANDARISASI DAN MENJAMIN KESELAMATAN DALAM PENUGASAN</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>THREATS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kesenjangan ekonomi dengan negara tetangga, berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat.</li> <li>2) Keterbatasan sarana dan prasarana pemerintahan, transportasi dan informasi. serta akses produksi dan pemasaran</li> <li>3) Terbatasnya kapasitas dalam mengelola potensi sumber daya local; dan Ketergantungan masyarakat terhadap barang produksi negara tetangga (murah dan berkualitas).</li> <li>4) <i>Trans national crime</i> (kejahatan yang terorganisir di lintas perbatasan negara yang melaksanakan bisnis illegal); dan Keterbatasan dalam pengamanan wilayah perbatasan negara khususnya wilayah laut,</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>ST</b></p> <p>(Ciptakan stragi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN, TRANSPORTASI DAN INFORMASI, SERTA AKSES PRODUKSI DAN PEMASARAN</li> <li>B. OPTIMALISASI PERAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA BATAS NEGARA</li> <li>C. PENGUATAN KAPASITAS DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA LOKAL</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>WT</b></p> <p>(Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. PENGUATAN KETAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA</li> <li>B. MENUMBUHKEMBANGKAN AKTIFITAS SOSIAL DAN EKONOMI LOKAL</li> <li>C. MEMASTIKAN SUPLAI UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN KEBUTUHAN POKOK LAINNYA</li> </ol>

### 3. Pilihan Alternatif Solusi

Untuk menentukan prioritas pemecahan masalah, dilakukan analisis tapisan Mcnamara. Analisis ini menentukan 3 (tiga) kriteria yang dinilai dari setiap alternatif gagasan, yakni kontribusi, kemurahan dan kelayakan. Analisis dengan menggunakan tapisan Mcnamara dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1.6.**  
Tapisan *Mcnamara Theory*

N O	ALTERNATIF SOLUSI	TUSI	KRITERIA ALTERNATIF SOLUSI			TOTAL SKOR	RKG
			KONTRIBUSI	BIAYA	LAYAK		
1	PENYUSUNAN MODEL PEMBANGUNAN KOLABORATIF POTENSI UNGGULAN DI PKSN KAWASAN PERBATASAN LAUT	DEPUTI II/ PKPL	5	4	5	14	I
2	PENGUATAN DATA DENGAN MEMANFAATKAN HASIL KONSOLIDASI DATA SPASIAL BERBASIS DIGITALISASI PADA 154 KECAMATAN LOKPRI; DAN INDEKS PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN	DEPUTI II/ PKPL	5	3	4	12	II
3	PENGUATAN PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM UPAYA PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN LAUT YANG SINERGIS ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN	DEPUTI II/ PKPL	4	3	5	12	II
4	REVISI KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK PENGUATAN PERAN BNPP DALAM LINI KOORDINASI	BIRO HOK	5	3	3	11	III
5	PENGUATAN KOMITMEN PERAN ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN ANTAR LEVEL PEMERINTAH	BIRO HOK	5	3	4	12	II
6	MEMASTIKAN PENYEDIAAN KETERSEDIAAN ALAT KERJA YANG TERSTANDARISASI DAN MENJAMIN KESELAMATAN DALAM PENUGASAN	BIRO KUH	4	2	5	11	III
7	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN, TRANSPORTASI DAN INFORMASI, SERTA AKSES PRODUKSI DAN PEMASARAN	DEPUTI III/ IF	4	3	4	11	III
8	OPTIMALISASI PERAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA BATAS NEGARA	DEPUTI I/ PBNWD	5	3	3	11	III
9	PENGUATAN KAPASITAS DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA LOKAL	DEPUTI II/ PKPL	4	3	3	10	IV
10	PENGUATAN KETAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA	DEPUTI I/ PBNWLU	4	2	5	11	III
11	MENUMBUHKEMBANG-KAN AKTIFITAS SOSIAL DAN EKONOMI LOKAL	DEPUTI III/ KESRA	4	3	4	11	III
12	MEMASTIKAN SUPLAI UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN KEBUTUHAN POKOK LAINNYA	DEPUTI III/ KESRA	3	3	3	9	IV

Keterangan:

1. PKPL : Potensi Kawasan Perbatasan Laut
2. IF : Infrastruktur Fisik
3. PBNWLU : Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara
4. PBNWD : Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat
5. KESRA : Kesejahteraan Rakyat
6. KUH : Keuangan, Umum, dan Hukum
7. HOK : Hukum, Organisasi dan Kepegawaian

Berdasarkan analisis prioritas tersebut di atas yang dapat dilakukan secara berkesinambungan pada jangka waktu pendek, menengah dan Panjang berdasarkan kewenangan keasdepan Potensi Kawasan Perbatasan Laut, adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKS N Kawasan Perbatasan Laut. (Jangka Pendek)
- b. Penguatan data dengan memanfaatkan hasil konsolidasi data spasial berbasis digitalisasi pada 154 kecamatan LOKPRI; dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan. (Jangka Menengah)
- c. Penguatan program pembangunan ekonomi dalam upaya pemanfaatan dan pengembangan Potensi Kawasan Perbatasan Laut yang sinergis antar pemangku kepentingan. (Jangka Panjang)
- d. Penguatan kapasitas dalam mengelola sumber daya lokal. (Jangka Panjang).

#### **1.1.7. Peran Kementerian/Lembaga Mitra Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut**

Selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi Settap BNPP sebagaimana penjelasan 1.1.2 di atas dengan pendekatan pada masing-masing prioritas pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara yang akan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait terutama yang berhubungan dengan pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan Laut, meliputi:

##### **1. Pembangunan SDM**

Dukungan teknis/pendampingan dari *sector industry* untuk mengembangkan wirausaha yang dapat meningkatkan nilai tambah untuk masyarakat.

##### **2. Pembangunan Infrastruktur**

- a. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Kawasan produksi dengan distribusi, Kawasan wisata.

- b. Mendongkrak lapangan kerja baru melalui peningkatan sarana dan prasarana di Kawasan Perbatasan.
  - c. Memberikan nilai tambah perekonomian rakyat melalui peningkatan sarana dan prasarana di Kawasan Perbatasan.
  - d. Pembangunan infrastruktur Kawasan Perbatasan negara area fokus PKSN dan Kecamatan LOKPRI.
3. Regulasi
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan;
  - b. Meningkatkan batas maksimal nilai perdagangan di Kawasan Perbatasan, antara lain melalui:
    - *Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia on Border Crossing* (Tahun 1970)
4. Penyederhanaan Birokrasi
- Optimalisasi fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah.
5. Transformasi Ekonomi
- a. Pengembangan PKSN termasuk ekonomi kawasan sekitarnya yang fokus pada pengembangan komoditas unggulan melalui peningkatan nilai tambah pada pengelolaan SDA dan manufaktur jasa modern.
  - b. Pembangunan SKPT di PKSN Laut.

#### 1.1.8. Inovasi

Memperhatikan seluruh proses analisis sebagaimana di atas, maka langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menghadirkan "**Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Laut.**"

Pengukuran terhadap inovasi atau terobosan, diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 1.7.**  
Pengukuran Inovasi

No.	Kriteria	Inovasi/Terobosan
1	2	3
1.	Kebaruan ( <i>Novelty</i> ) dalam sebuah perubahan	Judul Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Laut belum ditemukan dalam perumusan proyek perubahan dari Lembaga manapun
2.	Dampak positif dan manfaat	Memiliki manfaat bagi BNPP, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota dalam mengintervensi kebijakan pembangunan yang diorientasikan pada kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal yang berdaya saing secara bersinergi melibatkan akademisi, pelaku usaha, masyarakat.komunitas dan media informasi, terutama di 8 (delapan) PKSN Kawasan Perbatasan Laut, termasuk kecamatan LOKPRI.
3.	Solusi terhadap Masalah Pokok	Sebagai instrumen yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan secara kolaboratif dalam merencanakan dan menganggarkan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengawasi kebijakan pemerintah berdasarkan Renduk Pengelolaan BWN-KP Tahun 2020-2024 dan Renaksi yang disepakati tiap tahunnya.
4.	Berkesinambungan dan dapat direplikasikan	Untuk jangka menengah dan panjang dapat dilakukan ditailing Model berdasarkan karakteristik dan kondisi faktual di PKSN yang bersangkutan
5.	Memiliki kompatibilitas	Proyek perubahan ini dapat direalisasikan karena sudah sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan <i>project leader</i> dan realitas yang dihadapi di lapangan

### 1.1.9. Alur Pikir

Penulisan Proyek Perubahan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan, dimulai dari rangkaian kerja sebagai berikut:

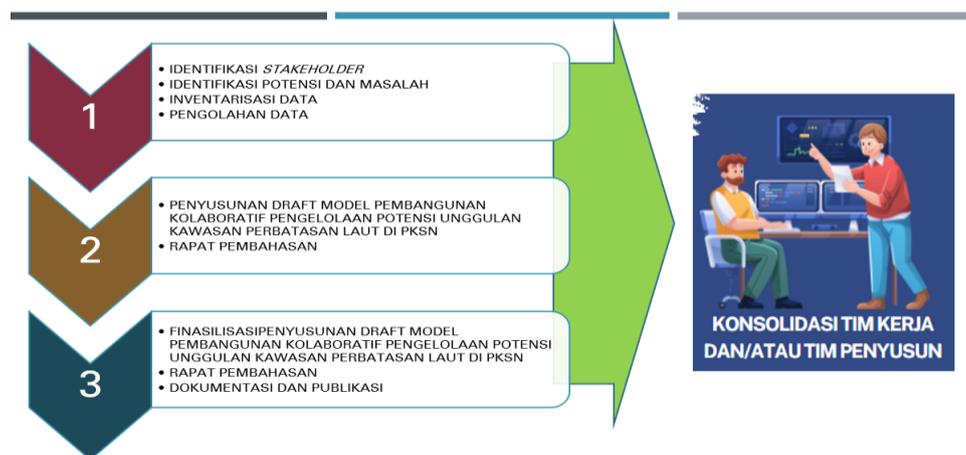
- a. Mengetahui secara tepat para pihak yang terlibat dengan memperhatikan peran dan kewenangannya.
- b. Mengidentifikasi kondisi potensi dan masalah dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pengembangan potensi unggulan di PKSN kawasan perbatasan laut berdasarkan hasil kajian yang telah dilaksanakan sebelumnya, sebagai asumsi terhadap permasalahan yang perlu ditangani lebih lanjut. Dilanjutkan rapat konfirmasi bersama organisasi perangkat daerah terkait di PKSN kawasan perbatasan laut.

- c. Melakukan penelaahan atas hasil inventarisasi identifikasi potensi dan masalah.
- d. Hasil penelaahan menjadi bahan dasar penyusunan draft Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut dengan mengembangkan pola pendekatan yang adaptif untuk pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut yang memberikan daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
- e. Pembahasan draft Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut bersama Kementerian/Lembaga terkait dan OPD pada PKSN kawasan perbatasan laut.
- f. Hasil pembahasan draft model dimaksud dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan saran dan masukan yang diterima untuk selanjutnya dibahas lebih lanjut pada sesi Finalisasi penyusunan model dimaksud.
- g. Seluruh rangkaian proses untuk tersusunnya dokumen Model Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut, didokumentasikan sebagai bahan publikasi lanjutan.

Rangkaian proses di atas dapat tergambar sebagai berikut:

**Gambar 1.4**

Alur Proses Penyusunan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut



## 1.2. Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan

### 1.2.1. Tujuan Proyek Perubahan

Tujuan Penyusunan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut sebagai panduan bagi pemerintah (Kementerian/Lembaga) terkait dan Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya percepatan pembangunan potensi kelautan pada kawasan perbatasan laut yang bersifat nasional dan komprehensif, terintegrasi, holistik serta memberikan arahan kebijakan dan program kegiatan yang konkrit bagi para pemangku kebijakan dan pelaku lainnya, dengan tujuan pelaksanaan pada:

#### 1. Tujuan Jangka Pendek (M1 Oktober – M4 November 2022)

- a. Membangun persepsi dan komitmen di internal keasdepan Potensi Kawasan Perbatasan Laut dalam optimalisasi peran dan fungsi dalam menghasilkan Model Pembangunan Kolaboratif dimaksud dan menguatkan dalam bentuk Tim Kerja.
- b. Mengidentifikasi potensi dan masalah dalam pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut dengan melalui: hasil konfirmasi dari 8 (delapan) lokasi PKSN kawasan perbatasan laut.
- c. penelaahan peran dan antar pihak dalam pengembangan dan pemanfaatan Potensi Kawasan Perbatasan Laut.
- d. pembelajaran potret pembangunan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut di kabupaten bengkalis.
- e. Pembahasan dan penyusunan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut.
- f. Finalisasi Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut.
- g. Penyiapan *evidence* dan bahan publikasi sebagai bentuk penyampaian Model Pembangunan Kolaboratif

Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut.

## **2. Tujuan Jangka Menengah (Desember 2022– Agustus 2023)**

- a. Sosialisasi Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut.
- b. Asistensi bersama kementerian/lembaga dalam rangka memfasilitasi PKSN di lokasi kawasan perbatasan laut (lokasi tertentu atau atas kebutuhan).
- c. Konsolidasi rencana dan capaian antar kementerian/lembaga dalam rangka memperkuat Rencana Aksi 2023 dan 2024.
- d. Pendetailan Model Pembangunan Kolaboratif.
- e. Penguatan data dengan memanfaatkan hasil konsolidasi data spasial berbasis digitalisasi pada 154 kecamatan LOKPRI; dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan.
- f. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut.

## **3. Tujuan Jangka Panjang (2023-2024)**

- a. Perluasan asistensi bersama kementerian/lembaga dalam rangka memfasilitasi PKSN di lokasi kawasan perbatasan laut (lokasi tertentu atau atas kebutuhan).
- b. Penguatan program pembangunan ekonomi dalam upaya pemanfaatan dan pengembangan Potensi Kawasan Perbatasan Laut yang sinergis antar pemangku kepentingan.
- c. Penguatan kapasitas dalam mengelola sumber daya lokal.
- d. Evaluasi implementasi pemanfaatan dan/atau pengembangan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut secara tematik.

## **1.2.2. Manfaat Proyek Perubahan**

### **1. Manfaat Internal**

- a. Meningkatkan kualitas kepemimpinan.
- b. Membangun tim yang solid dan memiliki loyalitas.
- c. Memperkuat kapasitas manajerial, melalui pembentukan tim *agile* dan untuk memastikan capaian pentahapan pelaksanaan sesuai dengan target waktu, sasaran pelaku dan tepat dalam pembahasan.
- d. Memperkuat peran jejaring kerja dalam upaya membangun kolaboratif.
- e. Memperbaiki kinerja organisasi.

### **2. Manfaat Organisasi**

- a. Mengoptimalkan kinerja BNPP dalam memfasilitasi Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah terkait.
- b. Sebagai referensi untuk memfasilitasi kementerian/lembaga dalam penyusunan Rencana Aksi setiap tahunnya, pelaksanaan dan evaluasi.
- c. Membangun kemitraan strategis dengan para pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP.

### **3. Manfaat bagi Kementerian/Lembaga Terkait**

- a. Adanya kejelasan atas terlaksananya komitmen para pihak terkait perencanaan dan pemenuhan capaian antar pihak terkait.
- b. Sebagai bahan referensi bersama dalam penyusunan renduk dan renaksi; dan pengambilan kebijakan sesuai kewenangannya.
- c. Sebagai instrumen yang dapat direplikasi oleh Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah dalam mensinergikan program dan kegiatannya di kawasan perbatasan laut.

#### 4. Manfaat bagi *Stakeholders* Lainnya

- a. Memudahkan pemahaman mengenai pemanfaatan dan/atau pengembangan potensi keunggulan di kawasan perbatasan laut.
- b. Penguatan peran pelaku terkait.
- c. Memperkuat dan mensinergikan peran antar pihak yang berorientasi pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pemanfaatan dan/atau pengembangan potensi unggulan di kawasan perbatasan laut.

#### 1.3. *Output* (Keluaran) dan *Outcome* (Hasil)

Secara umum *output* dan *outcome* dimaknai sebagai suatu hal yang berbeda dan diperoleh dan kurun waktu yang berbeda pula. *Output* merupakan hasil yang dicapai dalam jangka pendek, yang dapat diukur dengan jumlah atau volume. Sedangkan *Outcome* adalah hasil yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan jangka pendek yang menjadi dampak, manfaat atau harapan dari sebuah proses.

##### 1.3.1. **OUTPUT (HASIL)**

*Output* dari rancangan Proyek Perubahan ini adalah dalam bentuk 1 (satu) **dokumen** BNPP dalam bentuk sebuah **Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut** yang dapat dikembangkan oleh pemerintah (Kementerian/Lembaga terkait) dan Pemerintah Daerah sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan kecamatan Lokasi Prioritas (LOKPRI) pada kawasan perbatasan laut.

##### 1.3.2. **OUTCOME (DAMPAK)**

Dengan dikeluarkannya Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut yang dihasilkan melalui proses kolaboratif dengan melibatkan para pihak terkait diharapkan dapat menjadi referensi dan panduan dalam melakukan pemanfaatan dan/atau pengembangan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan

Perbatasan Laut sebagai 24 langkah percepatan pembangunan kawasan perbatasan laut yang memberikan manfaat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

## 1.4. Tahapan Perubahan Rencana Strategis

### 1.4.1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (*Milestone*)

Untuk mencapai tujuan dan manfaat sesuai dengan yang diharapkan, Proyek Perubahan ini akan dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu: jangka pendek (periode M1 Oktober–M4 November 2022); jangka menengah (periode Desember 2022–Agustus 2023); dan jangka Panjang (periode September 2023–Desember 2024), dengan rincian sebagai berikut:

#### A. Tahapan Jangka Pendek (M1 Oktober – M4 November 2022)

Penjelasan mengenai hal-hal yang ditindaklanjuti dalam tiap tahapan proses pada jangka pendek dimulai Minggu-1 Oktober s/d Minggu ke-4 November 2022, dapat dilihat sebagaimana Tabel 1.8. dibawah ini:

**Tabel 1.8.**  
Tahapan Jangka Pendek (M1 Oktober-M4 November 2022)

No	Kegiatan	Jadwal												Risiko	Mitigasi Risiko	Hasil	
		Okt 2022				Nov 2022				Des 2022							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
<b>Milestone A: Persiapan</b>																	
1.	Pelaksanaan Koordinasi internal Keasdepan Potensi Kawasan Perbatasan Laut														Rapat terkendala dengan kesibukan masing-masing Bidang	Rapat Menyesuaikan jadwal Bidang	Adanya persepsi yang sama dan membangun komitmen
2.	Pembentukan Tim Kerja														Tidak semangat karena tidak ada honor	Pendekatan informal dan memaksimalkan Coaching	Terbentuknya Tim Kerja ( <i>SK Tim</i> )
3.	Persiapan Pelaksanaan Penyusunan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut														Rapat terkendala dengan kesibukan masing-masing Bidang	Pemanfaatan WAG dan melalui daring	<input type="checkbox"/> Outline Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut <input type="checkbox"/> Agenda kegiatan Penyusunan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut <input type="checkbox"/> Identifikasi kapasitas (pelibatan peran, waktu dan anggaran)
<b>Milestone B: Identifikasi Potensi dan Masalah Pemanfaatan dan/atau Pengembangan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan</b>																	
4.	Pelaksanaan Koordinasi untuk menyusun instrument Identifikasi Potensi dan Masalah Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut														Ada yang tidak hadir	Dihubungi untuk tetap memberikan masukan lewat media yang kita tentukan (WA Group)	Adanya Instrumen Identifikasi Potensi dan Masalah Pemanfaatan dan/atau Pengembangan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut
5.	Persiapan Pelaksanaan FGD Isu-Isu Strategis dan inventarisasi Data dan Informasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut														Administrasi tidak terpenuhi segera (perolehan tanda tangan pimpinan karena agenda padat)	Menugaskan staf untuk monitor	<input type="checkbox"/> Undangan <input type="checkbox"/> Data sekunder

6.	FGD Isu-isu Strategis dan Inventarisasi Potensi dan Masalah Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut(2 tahap untuk 8 PKSN; dan 1 kegiatan untuk KL)																		Data dan Informasi hasil inventarisasi tidak lengkap, karena peserta belum optimal menyiapkannya	Menugaskan staf untuk mengkompilasi dari data sekunder dan konfirmasi ulang	Adanya data Potensi dan Masalah Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut <input type="checkbox"/> 8 (delapan) lokasi PKSN kawasan perbatasan laut; <input type="checkbox"/> Kementerian/ Lembaga terkait
7.	Pembelajaran potret pembangunan potret Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Lautdi Kabupaten Bengkalis																		Membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan hasil faktual	<input type="checkbox"/> Pembagian tugas kepada staf untuk mendapatkan data yang komprehensif	<input type="checkbox"/> Hasil monitoring dan evaluasi di PKSN Bengkalis <input type="checkbox"/> Diperolehkannya data yang akurat dan isu strategis yang faktual.
<b>Milestone C: Pembahasan Dan Penyusunan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut</b>																					
8.	Konsolidasi internal Keasdepan bersama tim akademisi data potensi dan masalah Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut																		Membutuhkan personil yang berkapasitas dalam menganalisa data potensi dan masalah	<input type="checkbox"/> Melibatkan akademisi dalam memberikan pandangan secara teoritis dan menguatkan dalam melakukan analisis <input type="checkbox"/> Menguatkan komitmen Tim Kerja bersama dalam memfasilitasi	<input type="checkbox"/> Terinventarisasi data potensi dan masalah dalam pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut <input type="checkbox"/> analisa yang potensial
9.	Persiapan Rapat Pembahasan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Laut																		Administrasi tidak terpenuhi segera (perolehan tanda tangan pimpinan karena agenda padat)	Menugaskan staf untuk monitor	<input type="checkbox"/> Undangan <input type="checkbox"/> Draft Model
10.	PembahasanDraft Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Laut, dihadiri Keasdepan terkait BNPP, Kementerian/Lembaga terkait dan PKSN Kawasan Perbatasan Laut																		Ada peserta yang tidak dapat hadir	Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, luring dan daring	<input type="checkbox"/> Draft Model <input type="checkbox"/> Notulen <input type="checkbox"/> Dokumentasi pembahasan
11.	Konsolidasi internal Keasdepan bersama tim akademisi																		Ada yang tidak dapat hadir	Dihubungi untuk tetap memberikan masukan lewat media yang kita tentukan (WA Group)	Hasil penyesuaian kembali rancangan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Laut → Drafting Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut
<b>Milestone D: Finalisasi Penyusunan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut</b>																					
12.	Persiapan Rapat Pembahasan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Laut																		Administrasi tidak terpenuhi segera (perolehan tanda tangan pimpinan karena agenda padat)	Dihubungi untuk tetap memberikan masukan lewat media yang kita tentukan (WA Group)	<input type="checkbox"/> Undangan <input type="checkbox"/> Draft Model
13.	Finalisasi penyusunan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Laut di PKSN dihadiri Keasdepan terkait BNPP, Kementerian/Lembaga terkait dan PKSN Kawasan Perbatasan Laut																		Ada yang tidak hadir	Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, luring dan daring	<input type="checkbox"/> Undangan <input type="checkbox"/> Draft Model <input type="checkbox"/> Notulen <input type="checkbox"/> Dokumentasi pembahasan
14.	Konsolidasi internal Keasdepan bersama tim akademisi																		Ada yang tidak dapat hadir	Dihubungi untuk tetap memberikan masukan lewat media yang kita tentukan (WA Group)	<input type="checkbox"/> Hasil Model
<b>Milestone E: Penyiapan Evidence, Publikasi, Dan Laporan Hasil Proper</b>																					
15.	Penyusunan evidence alur proses kegiatan																		<input type="checkbox"/> Konsolidasi dokumen kurang optimal <input type="checkbox"/> Kapasitas editing video alur proses belum optimal	<input type="checkbox"/> Menyiapkan folder google drive untuk simpan data <input type="checkbox"/> Mengguna-kan aplikasi yang <i>friendly</i>	Vidio visual alur proses

16.	Pembuatan bahan publikasi									Kapasitas memproduksi publikasi	Perlu pelibatan <i>outsider</i>	Vidio publikasi
17.	Penyusunan Laporan Proyek Perubahan									Waktu penyelesaian laporan Proyek Perubahan terbatas	Mengoptimalkan peran Tim Kerja	Laporan Proyek Perubahan

## B. Tahapan Jangka Menengah (Januari 2023 – Agustus 2023)

Penjelasan mengenai hal-hal yang ditindaklanjuti dalam tiap tahapan proses pada jangka pendek dimulai Minggu-2 Desember s/d Minggu ke-4 Agustus 2023, dapat dilihat sebagaimana Tabel 1.9. dibawah ini:

**Tabel 1.9.**  
Tahapan Jangka Jangka Menengah (Desember 2022 – Agustus 2023)

No	Kegiatan	Jadwal								Risiko	Mitigasi Risiko	Hasil
		'22	2023									
		12	1	3	5	6	7	8				
<b>Milestone F: Sosialisasi Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut</b>												
1.	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Persiapan Sosialisasi Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut dengan Tim Kerja									Kesibukan Tim Kerja	Waktu disesuaikan, bisa ambil yang siang hari	Adanya kesepakatan pelaksanaan Sosialisasi Perbup ( <i>Notulen dan dokumentasi rapat</i> )
2.	Sosialisasi Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut									Pemahaman peserta sosialisasi beragam	Share di Group dan melalui media sosial	Adanya pemahaman terkait Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut ( <i>Notulen dan dokumentasi rapat</i> )
<b>Milestone G: asistensi bersama kementerian/lembaga dalam rangka memfasilitasi PKSN di lokasi kawasan perbatasan laut tertentu</b>												
1.	Konfirmasi kesiapan lokasi PKSN yang akan mengimplementasikan									Tidak semua PKSN dapat melaksanakan	Sinergikan dengan perencanaan program K/L dengan pemda lokasi PKSN kawasan perbatasan laut	Surat konfirmasi dan hasil konfirmasi
2.	asistensi bersama kementerian/lembaga dalam rangka memfasilitasi PKSN di lokasi kawasan perbatasan laut tertentu									Terbatasnya personil dan anggaran	Efektifitas fasilitas yang diberikan	Kesepakatan untuk tindak lanjut
<b>Milestone H: Konsolidasi rencana dan capaian antar kementerian/lembaga dalam rangka memperkuat Rencana Aksi 2023 dan 2024</b>												
1.	Rapat Koordinasi antara Kementerian/Lembaga mengenai Renaksi 2024									Data dari Kementerian/Lembaga tidak terkompulir dengan baik	Persiapan sebelum rapat dimatangkan dengan meminta konfirmasi data lebih awal untuk ditinjau sesuai kebutuhan	Rencana program kerja Kementerian/Lembaga, pencermatan pada tujuan, sasaran, target dan anggaran untuk tahun 2024
2.	Rapat Koordinasi antara Kementerian/Lembaga mengenai Renaksi 2025									Data dari Kementerian/Lembaga tidak terkompulir dengan baik	Persiapan sebelum rapat dimatangkan dengan meminta konfirmasi data lebih awal untuk ditinjau sesuai kebutuhan	Rencana program kerja Kementerian/Lembaga, pencermatan pada tujuan, sasaran, target dan anggaran untuk tahun 2024
<b>Milestone I: Pendetailan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut</b>												

1.	Pembentukan Tim Kerja yang solid dan berkomitmen dalam melaksanakan tugasnya									Keterbatasan personil dan Waktu	Melalui Lomba lewat daring dan aplikasi	Adanya dinamika implementasi sebagai masukan untuk penguatan substansi untuk kesiapan penditailan Model
2.	Penditailan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut									Tenaga dan Waktu Terbatas	Memberdayakan Tim Kerja, libatkan akademisi, K/L, dan PKSN Perbatasan Laut	Dokumen Ditail Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut
<b>Milestone J: Penguatan data dengan memanfaatkan hasil konsolidasi data spasial berbasis digitalisasi pada 154 kecamatan LOKPRI; dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan</b>												
1.	Pembangunan konsolidasi data spasial berbasis digitalisasi									Dibutuhkan tim IT	Jasa Konsultan	Sistem Informasi
2.	Inputing dan analisa data Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan									Tenaga inputing dan analisis data terbatas	Bentuk Tim kerja dan libatkan tenaga pendukung	Data IPKP
<b>Milestone K: Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut</b>												
1.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi hambatan pelaksanaan pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut									Tenaga dan Waktu Terbatas	Memberdayakan Tim Kerja	Data dan informasi mengenai Implementasi Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut (laporan)
2.	Pelaporan kepada Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan hasil pelaksanaan tugas									Tenaga dan Waktu Terbatas	Memberdayakan Tim Kerja	Dokumen hasil pelaksanaan Fasilitas Implementasi Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut

### C. Tahapan Jangka Panjang (September 2023–Desember 2024)

Penjelasan mengenai hal-hal yang ditindaklanjuti dalam tiap tahapan proses pada jangka pendek dimulai Minggu-1 Septemberber s/d Minggu ke-4 Desember 2024, dapat dilihat sebagaimana Tabel 1.10. dibawah ini:

**Tabel 1.10.**  
Tahapan Jangka Jangka Panjang (September 2023 – Desember 2024)

No	Kegiatan	Jadwal										Risiko	Mitigasi Risiko	Hasil
		Tahun 2023		Tahun 2024										
		9 10	11 12	1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12					
<b>Milestone J : Review dan Pengembangan Proyek Perubahan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut</b>														
1.	Pelaksanaan Koordinasi review Proyek Perubahan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut											Yang hadir tidak lengkap	Dihubungi melalui media untuk tetep memberikan review	Adanya masukan Proyek Perubahan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut(dokumentasi rapat)
2	Perluasan Asistensi bersama Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Memfasilitasi PKSN Di Lokasi Kawasan Perbatasan Laut (Lokasi Tertentu Atau Atas Kebutuhan)											Respon pemda lokasi PKSN lambat	Penguatan isu strategis keutaman dan kepentingan untuk mengimplementasikan	Kesiapan Pemda lokasi PKSN lanjutan BA. Kesepakatan
3	Penguatan program pembangunan ekonomi dalam upaya pemanfaatan dan pengembangan Potensi Kawasan Perbatasan Laut yang sinergis antar pemangku kepentingan											Tidak semua KL terkait dapat disinergikan programnya untuk wilayah tertentu	Optimalisasi program yang ada dan diperkuat sinergiatanya	
4	Penguatan kapasitas dalam mengelola sumber daya lokal											Keterbatasan personil	Penguatan komunikasi,	<input type="checkbox"/> Modul Bimtek <input type="checkbox"/> Bimtek

											koordinasi, dan pelibatan dengan KL terkait	
5	Pengembangan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut dengan memanfaatkan hasil konsolidasi data spasial berbasis IT pada 222 LOKPRI; dan indeks pengelolaan kawasan perbatasan.									Stagnan Kapasitas memanfaatkan IT terbatas	Inovasi yang terus menerus	Bukti pengembangan dalam bentuk foto/video
6	Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan									Keterbatasan tenaga dan waktu	Memberdayakan Tim Kerja	Dokumen evaluasi

## 1.5. Rencana Strategi Marketing

### 1.5.1. Identifikasi dan Analisa Stakeholders

Dengan mengedepankan *Pentahelix* yaitu terbangunnya peran Pemerintah (termasuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota), akademisi, pelaku usaha, masyarakat/komunitas, dan media informasi.

Setelah melalui proses pengidentifikasi dan analisis *stakeholders*, selanjutnya dapat dipetakan para pihak yang memiliki keterkaitan dalam pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut, dengan hasil analisis sebagai berikut:

**Gambar 1.5.**  
Kelompok Stakeholders Sesuai katagorinya  
(Promoters, Latens, Defenders, Apathetics)



### 1.5.2. Strategi Komunikasi/Mobilisasi *Stakeholders*

Strategi komunikasi/mobilisasi *stakeholder* dapat dijelaskan melalui tabel 1.11 berikut ini:

**Tabel 1.11.**  
Strategi Komunikasi/Mobilisasi *Stakeholders*

No	Kelompok Stakeholders	Bentuk Strategi Komunikasi
1.	Promoters	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memberikan informasi untuk meyakinkan bahwa kegiatan yang diusulkan sangat urgent, dan menjadi kunci untuk mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi di lokasi PKSN Kawasan Perbatasan Laut secara signifikan.</li> <li>2) Memberikan pemahaman dan pengertian serta motivasi bahwa kegiatan Proyek Perubahan ini harus dilaksanakan.</li> <li>3) Aktif berkomunikasi dan meminta masukan atas pelaksanaan Proyek Perubahan dan menyesuaikan pelaksanaan apabila masukan merupakan kritik membangun.</li> <li>4) Melaporkan hasil secara berkala (<i>mentor</i>).</li> <li>5) Selalu berkonsultasi ketika terjadi permasalahan. Dan melakukan diskusi dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Proyek Perubahan (<i>mentor</i> dan <i>coach</i>).</li> <li>6) Memberikan informasi berkala mengenai pentingnya kegiatan (Tim Kerja).</li> <li>7) Mengikuti setiap petunjuk dan arahan (<i>mentor</i> dan <i>coach</i>).</li> <li>8) Memberikan apresiasi serta mengingatkan secara terus menerus pencapaian upaya agar Proyek Perubahan dapat diselesaikan tepat waktu (Tim Kerja).</li> <li>9) Menyampaikan tingkat kepentingan stakeholder dalam kegiatan.</li> </ol>
2.	Latents	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) memberikan informasi mengenai maksud, tujuan, manfaat, output yang dihasilkan serta <i>impact</i> dalam pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut.</li> <li>2) Diberikan kesempatan untuk berpartisipasi sesering mungkin</li> <li>3) Melakukan koordinasi secara intensif dalam setiap progress kegiatan</li> <li>4) Menyampaikan tingkat kepentingan stakeholder dalam kegiatan.</li> <li>5) Perlakukan kelompok ini dengan baik</li> </ol>
3.	Defenders	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyampaikan manfaat yang akan didapatkan oleh stakeholder.</li> </ol>
4.	Apathetic	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) memberikan informasi seperlunya dan menjaga agar tidak menjadi penghambat dari kegiatan rencana Proyek Perubahan</li> <li>2) Memberikan motivasi agar terlibat lebih intensif dan mendukung kegiatan</li> </ol>

Hal sebagaimana di atas menunjukkan bahwa pengelompokan stakeholder menunjukkan besar kecilnya peran yang dapat dilakukan dan diberikan, serta strategi komunikasi yang dapat dibangun dan bagaimana pelibatannya masing-masing untuk memperkuat model pemangunan kolaboratif dimaksud. Selanjutnya peran dari pemetaan *stakeholder* ini dapat disimpulkan sebagaimana Gambar 1.6, di bawah ini:

**Gambar 1.6.**  
Strategi Komunikasi/Mobilisasi *Stakeholders*



### 1.5.2. Strategi *Marketing* Proyek Perubahan

Sebagai organisasi sektor publik, BNPP juga perlu membangun strategi *marketing* Proyek Perubahan, hal ini dimaksudkan adalah untuk penguatan terhadap produk yang dihasilkan, strategi dimaksud memperhatikan hal-hal sebagaimana gambar berikut:

**Gambar 1.7.**  
Strategi *Marketing* Proyek Perubahan



Sebagaimana Gambar 1.7. di atas menjelaskan, bahwa:

1. **Customer**, adalah adalah target dan fokus dalam *marketing*. Untuk itu *customer* harus dikenali, dipahami, dan dipenuhi kebutuhan dan keinginannya. Adapun *customer* dimaksud, adalah: Internal BNPP, Kementerian/Lembaga terkait. PKS, dan Kecamatan LOKPRI

yang memiliki keterkaitan dalam pengelolaan potensi unggulan kawasan perbatasan laut.

2. **Product**, dapat berwujud (*tangible*) dan tidak berwujud (*intangible*) karena definisi produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan, dalam hal ini, produk yang dihasilkan adalah Dokumen Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut yang disampaikan melalui Keputusan Kepala BNPP.
3. **Price**, adalah nilai (*value*) yang dipertukarkan untuk mendapatkan suatu produk, secara lebih luas harga adalah sejumlah nilai yang dipertukarkan oleh konsumen dalam rangka mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan barang atau layanan. Dalam hal ini, hal yang diperoleh adalah nilai efisiensi dan efektifitas, yaitu adanya penyederhanaan prosedur, dan pengelolaan yang bersifat kolaboratif yang saling menguatkan.
4. **Place**, adalah suatu posisi atau titik tertentu suatu produk akan diakses oleh *customer*. Dalam hal ini, *customer* dapat memperoleh produk secara langsung difasilitasi konsultasi di kantor BNPP, melalui media *online*, sarana virtual dan hotel. Pemanfaatan sarana virtual maupun hotel disesuaikan bilamana difasilitasi melalui kegiatan tertentu.
5. **Promotion**, adalah suatu proses yang dilakukan setelah produk berhasil didesain, ditetapkan harga, dan disusun strategi distribusi, maka informasi tentang produk perlu diinformasikan kepada *customer*. Tidak hanya dimensi penyampaian informasi namun bagaimana informasi yang disampaikan dapat mempengaruhi keputusan customer untuk menggunakan, mendukung, atau berkomitmen untuk melaksanakan sesuai dengan hal yang disampaikan melalui sarana promosi yang digunakan. Promosi dapat dilakukan melalui forum sosialisasi menggunakan media sosial maupun media *online*.

## 1.6. 1.6.1. Identifikasi Potensi Kendala dan Masalah

Dalam menghasilkan suatu Proyek Perubahan, tentunya akan diperhadapkan pada kendala dan masalah di tiap tahapannya, sebagaimana dapat diketahui pada Tabel 1.12. berikut:

**Tabel 1.12.**  
Identifikasi Kendala dan Masalah pada tiap Tahapan

No.	Tahapan	Kendala dan Masalah
1.	Persiapan	1. Penyiapan SK Penetapan Tim Kerja/Efektif 2. Rapat Persiapan
2.	Perencanaan	1. Pembahasan internal keasdepan 2. Pembahasan dengan akademisi untuk dukungannya
3.	Identifikasi potensi dan masalah dalam pemanfaatan dan/atau pengembangan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut	1. penyiapan administrasi untuk fasilitasi pelaksanaan kegiatan 2. FGD dengan 8 (delapan) PKS N Kawasan perbatasan laut 3. FGD dengan kementerian/lembaga terkait 4. pembelajaran di PKS N bengkalis
4.	Penyusunan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi unggulan kawasan perbatasan di PKS N di PKS N	Penyusunan dan pembahasan: 1. Pelibatan peran antar keasdepan pada Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut. 2. Pelibatan kementerian/lembaga terkait, pemda di PKS N kawasan perbatasan laut.
5.	Finalisasi Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi unggulan kawasan perbatasan di PKS N	1. Penyiapan administrasi untuk fasilitasi pelaksanaan kegiatan 2. Memfinalkan penyusunan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut

## 1.6.2. Mengatasi Kendala

Dengan dapat memetakan kendala dan masalah apa saja yang akan terjadi dalam tiap tahapannya, maka akan dengan mudah dapat dilakukan upaya mitigasi risiko, sebagaimana penjelasan berikut ini:

**Tabel 1.13.**  
Risiko yang Harus Diantisipasi

No.	Tahapan	Mitigasi Risiko
1.	Persiapan	1. pembelajaran secara berjenjang 2. penguatan komunikasi dan koordinasi dengan dukungan teknologi komunikasi
2.	Perencanaan	1. mengoptimalkan peran dan ketersediaan sumber daya yang ada 2. dibutuhkan kesediaan pimpinan dan Tim Kerja untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan non dipa
3.	Identifikasi potensi dan masalah dalam pemanfaatan dan/atau pengembangan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut	1. menguatkan keyakinan, bahwa kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik 2. optimalisasi koordinasi dan komunikasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimungkinkan dan tersedia 3. memanfaatkan data sekunder (bps), data faktual hasil pembelajaran di PKS N bengkalis; data dan informasi hasil kajian, data monev.

		4. pemanfaatan media daring untuk melaksanakan pertemuan non dipa
4.	Penyusunan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut	1. komunikasi dan koordinasi dengan bantuan teknologi komunikasi 2. pemanfaatan kegiatan yang relevan dan ketersediaan media daring untuk melaksanakan pertemuan non DIPA
5.	Finalisasi Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi unggulan kawasan perbatasan	1. beri penguatan dan penghargaan atas peran Tim Kerja atas kontribusinya 2. optimalisasi peran pemerintah provinsi dan PLBN 3. pemanfaatan media daring untuk melaksanakan pertemuan non dipa

### 1.7. Faktor Kunci Keberhasilan Proyek Perubahan

Dalam menghasilkan suatu Proyek Perubahan, dibutuhkan *effort* Tim Kerja yang besar pula, sehingga dapat memastikan hal yang telah digagas (ide) dapat dibangun dalam narasi untuk selanjutnya dipedomani dan dilaksanakan. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh integritas yang saling menguatkan, sebagai berikut:

1. Tim Kerja yang solid dan memiliki semangat untuk memberikan nilai tambah dalam berkinerja dan menghasilkan output.
2. Memiliki persepsi yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan laut.
3. Kemampuan membangun jejaring antar pihak yang berkepentingan dan yang dapat memberikan kontribusi pemikiran produktif.

Komitmen untuk dapat menghasilkan sebuah dokumen yang adaptif yang dapat dijadikan panduan dalam melaksanakan pembangunan kolaboratif untuk pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut.

### 1.8. Tata Kelola Proyek Perubahan

#### 1.8.1. Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan

Untuk merealisasikan tujuan, sasaran dan manfaat Proyek Perubahan, maka harus dibentuk Tim Kerja dengan memanfaatkan sumber daya organisasi dan *stakeholders* yang ada. Tim Proyek Perubahan ini dikendalikan dan dikoordinasikan oleh *Reformer* untuk melaksanakan tahapan Proyek Perubahan. Tim Proyek Perubahan yang akan dibentuk terdiri dari :

- a. Pengarah dalam hal ini adalah *Mentor*: Plh. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan;
- b. Ketua dalam hal ini *Reformer*: Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut;
- c. Tim Kerja:
  - 1) Kelompok Kerja Identifikasi Potensi dan Masalah Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut;
  - 2) Kelompok Kerja Penyusunan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Laut; dan
  - 3) Kelompok Kerja Publikasi dan Dokumentasi.

Dalam menghasilkan proyek perubahan, tentunya Tim Kerja membutuhkan peran *stakeholders* sebagai sumber data dan informasi yang dibutuhkan untuk dianalisis lebih lanjut dan memperkuat penyusunan model dimaksud. *Stakeholders* yang berpengaruh dimaksud, yaitu:

- a. ***Stakeholders Internal***: Keasdepan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan pada Kedeputan Bidang Pengelolaan Potensi kawasan Perbatasan; Keasdepan; Kedeputan Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara; Kedeputan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan; Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan; dan Biro Perencanaan dan Kerjasama.
- b. ***Stakeholders Eksternal***: Kementerian/Lembaga terkait; Pelaku usaha/Lembaga ekonomi; PKSN Kawasan Perbatasan Laut; Akademisi; dan Masyarakat/Komunitas.

### 1.8.2. Struktur Organisasi Pelaksana dan Tim Kerja

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNPP mengenai Tim Kerja Penyusunan Proyek Perubahan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Laut Tahun 2022 yang segera akan ditetapkan kemudian, dengan susunan tim kerja sebagaimana pada Tabel 1.14. berikut ini:

**Tabel 1.14.**

Susunan Tim Kerja Penyusunan Proyek Perubahan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKS N Kawasan Perbatasan Laut di Lokasi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahun 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. TUMPAK H SIMANJUNTAK, MA, CRGP, QGIA, CFA, CGCAE. sampai dengan 1 Novmber 2022, dan dilanjutkan oleh Dr. GUTMEN NAINGGOLAN, SH., M.Hum.	Plh. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan	Pengarah
2.	Dra. FARIDA KURNIANIGRUM, MM	Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, BNPP	Ketua
3.	Drs. SRIYANTO, M.Si	Perencana Ahli Madya Koordinator Bidang Faslak dan Monev pada Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, BNPP	Sekretaris
<b>A. KELOMPOK KERJA IDENTIFIKASI MODEL PEMBANGUNAN KOLABORATIF PENGELOLAAN POTENSI UNGGULAN KAWASAN PERBATASAN LAUT</b>			
1.	HARIMAN LATUCONSINA, S.STP	Perencana Ahli Muda SubKoordinator Bidang Fasilitas Pelaksanaan pada Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, BNPP	Ketua
2.	SUMONO, SH	Perencana Ahli Muda SubKoordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi pada Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, BNPP	Anggota
3.	ROHANI MANURUNG, S.Ak	JFU pada Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, BNPP	Anggota
4.	GRACE JULYANA M BUTARBUTAR, ST	JFU pada Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, BNPP	Anggota
5.	ROY SHUMADAN L. BANCIN, S.STP	JFU pada Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, BNPP	Anggota
6.	MICHAEL DELPOPI, S.Pi.	JFU pada Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, BNPP	Anggota
7.	ROMADHANI SYAHPUTRA, S.Pd.	Staf pada Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, BNPP	Anggota
<b>B. KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN MODEL PEMBANGUNAN KOLABORATIF PENGELOLAAN POTENSI UNGGULAN KAWASAN PERBATASAN LAUT</b>			
1.	ANDREW FM LESSIL, S.STP, M.Si.	Perencana Ahli Muda SubKoordinator Bidang Perencanaan Anggaran pada Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, BNPP	Ketua
2.	AGUNG ARFIAN ADIUTAMA, S.STP	JFU pada Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, BNPP	Anggota
3.	WIMA AYU KRISTIANA, A.P.Kb.N	JFU pada Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, BNPP	Anggota

4.	ANA MAISYAROH INDRAYANTI, S.Si	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Muda, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
5.	ANDY DWI BAYU BAWONO, SE, M.Si, Ph.D	Akademisi Universitas Muhammadiyah Surakarta	Anggota
6.	PURRI ANDRIATY, SP, MSi	Konsultan Pengelola Keuangan Publik	Anggota
7.	WIDYAWATI HARUN, SH	Konsultan Hukum Pemerintahan	Anggota
8.	MEYTIA EKA, S.Pi	Staf pada Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, BNPP	Anggota
<b>C. KELOMPOK KERJA PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI</b>			
1.	DEKI SAHPUTRA, S.SiT, MT	Perencana Ahli Madya Koordinator Bidang Perencanaan pada Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, BNPP	Ketua
2.	SUSILAWATI, S.Pd	Perencana Ahli Muda SubKoordinator Bidang Kebijakan Program pada Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, BNPP	Anggota
3.	LISMARDIYAH, S.Sos	JFU pada Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, BNPP	Anggota
4.	M. ARBI NUGRAHA, SE	JFU pada Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, BNPP	Anggota
5.	ANDI ICHSAN, SE	Staf pada Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, BNPP	Anggota
6.	RATIH DWIJAYANTHI, S.Pd	Staf pada Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, BNPP	Anggota
7.	NIRMA LISTIANA, S.Ikom	Staf pada Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, BNPP	Anggota

Untuk penyelesaian Proyek Perubahan dimaksud, maka dibentuk Tim Kerja dengan penugasan sebagai berikut:

- a. Tim Kerja Penyusunan Proyek Perubahan Strategi Pemanfaatan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Laut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
  - 1) Pengarah
  - 2) Ketua
  - 3) Sekretaris
  - 4) Kelompok Kerja Identifikasi Potensi dan Masalah Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut

- 5) Kelompok Kerja Penyusunan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Laut
  - 6) Kelompok Kerja Publikasi dan Dokumentasi
- b. Dalam melaksanakan tugas mempunyai rincian tugas Pengarah:
- 1) Pengarah** (Plh, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut, Bapak Dr. Tumpak H Simanjuntak, MA, CRGP, QGIA, CFrA, CGCAE./Bapak Dr. Gutmen Nainggolan, SH., M.Hum.)
    - Mengarahkan secara umum tugas dari setiap tahapan kegiatan.
    - Menerima laporan jalannya Proyek Perubahan
  - 2) Ketua** (Peserta PKN Tingkat II/**Reformer** - Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, Dra. Farida Kurnianingrum, MM.)
    - Menetapkan rencana kegiatan.
    - Memimpin seluruh rangkaian kegiatan.
    - Melaporkan hasil penyusunan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Laut.
  - 3) Sekretaris:**
    - Membantu Ketua menyusun dokumen kegiatan.
    - Membantu Ketua mengoordinasikan kegiatan.
    - Menyiapkan bahan rapat dan laporan kegiatan.
  - 4) Kelompok Kerja Identifikasi Potensi dan Masalah** Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut
    - Melakukan identifikasi potensi dan masalah pengelolaan potensi unggulan kawasan perbatasan laut.
    - Melakukan analisa hasil identifikasi potensi dan masalah pengelolaan potensi unggulan kawasan perbatasan laut.
    - Melaporkan hasil analisa identifikasi potensi dan masalah pengelolaan potensi unggulan kawasan perbatasan laut.

**5) Kelompok Kerja Penyusunan Model Pembangunan Kolaboratif** Pengelolaan Potensi Unggulan Di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Laut

- Menyusun draf Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Laut.
- Melakukan pembahasan draf Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Laut bersama Kementerian/Lembaga terkait, PKSN, dan PLBN di kawasan perbatasan laut.
- Melakukan koordinasi dengan Kedeputusan dan Keasdepan terkait.
- Melakukan finalisasi Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Laut.
- Melaporkan hasil penyusunan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Laut

**6) Kelompok Kerja Publikasi dan Dokumentasi**

- Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pendokumentasian.
- Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan publikasi, dan media.

**1.8.3. Struktur Tata Kelola Proyek Perubahan**

Struktur Tata Kelola Proyek Perubahan dapat digambarkan sebagaimana Gambar 1.8. berikut:

**Gambar 1.8.**  
Struktur Tata Kelola Manajemen Perubahan



Gambar 1.6. sebagaimana di atas, menunjukkan peran yang saling bersinergi antara Tim Kerja dengan pihak terkait lainnya, keutamaan peran *mentor* dalam memberikan arahan dan penguatan, di samping peran *coach* dalam pendampingan. Demikian pula *stakeholders* internal dan eksternal yang memperkuat proses *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari proyek perubahan ini.

#### 1.8.4. Tugas dan Kewenangan Tim Efektif

Sebagaimana telah saya jelaskan di atas mengenai pelibatan para pihak dalam penyusunan Proyek Perubahan ini, baik sebagai *mentor*, *coach*, *stakeholder* internal, *stakeholder* eksternal, dan Tim Kerja yang terbentuk, bertugas sebagai tim efektif, sebagaiberikut

a. **Mentor** (Plh, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut – Bapak Dr. Tumpak H. Simanjuntak, MA, CRGP, QGIA, CFrA, CGCAE)

- 1) Bertindak sebagai pengarah pada Tim Kerja penyusunan Proyek Perubahan yang membimbing sekaligus pengawas

Peserta PKN TI. II/*Reformer* secara profesional serta berperan sebagai inspirator dan motivator;

- 2) Menetapkan pembentukan Tim Kerja Proyek Perubahan;
- 3) Memberikan arahan, dukungan, dan petunjuk dalam keseluruhan pelaksanaan Proyek Perubahan;
- 4) Memberikan petunjuk dan bimbingan untuk mengatasi masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan Proyek Perubahan;
- 5) Menerima laporan dan memantau jalannya Proyek Perubahan yang dilakukan oleh peserta.

b. Peserta PKN TI. II/*Reformer* (Asisten Deputi Potensi **Kawasan** Perbatasan Laut - Dra. Farida Kurnianingrum, MM)

- 1) Bertindak sebagai Ketua pada Tim Kerja penyusunan Proyek Perubahan dimaksud.
- 2) Menyusun ide, gagasan dan rencana Proyek Perubahan;
- 3) Menyusun tahapan rencana Proyek Perubahan;
- 4) Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan Proyek Perubahan;
- 5) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua *stakeholder*;
- 6) Membentuk Tim Kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Proyek Perubahan dan melakukan kerjasama dengan Tim Kerja;
- 7) Melaksanakan seluruh tahapan yang telah dirancang;
- 8) Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada *mentor* dan *coach* untuk mendapatkan evaluasi dan saran terhadap Proyek Perubahan;
- 9) Menyusun laporan akhir Proyek Perubahan.

c. **Coach** (Widyaiswara - Drs, Machmudan Sadiq, MM)

- 1) Melakukan diskusi dan memberikan masukan peserta PKN Tk. II/*Reformer* dalam menyusun rancangan Proyek Perubahan;
- 2) Memonitor kegiatan peserta PKN Tk II/*Reformer* selama tahap aktualisasi Proyek Perubahan;

- 3) Melakukan intervensi bila peserta PKN Tk II/*Reformer* mengalami permasalahan sesuai kewenangan coach;
- 4) Melakukan komunikasi dengan mentor terkait kegiatan peserta PKN Tk. II/*Reformer* selama tahap aktualisasi Proyek Perubahan;
- 5) Memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan persetujuan kepada peserta PKN Tk. II/*Reformer* dalam penyusunan Proyek Perubahan;
- 6) Melakukan monitoring kegiatan peserta PKN Tk. II/*Reformer* selama tahap aktualisasi kepemimpinan;
- 7) Memberikan *feedback* terhadap laporan perkembangan implementasi Proyek Perubahan dari peserta PKN Tk. II/*Reformer*;
- 8) Memfasilitasi jika peserta PKN Tk. II/*Reformer* mengalami kesulitan;
- 9) Mendukung pelaksanaan Proyek Perubahan;
- 10) Melakukan koordinasi dengan mentor untuk membantu peserta PKN Tk. II/*Reformer* apabila mengalami permasalahan

d. **Tim Kerja**

- 1) Dipimpin oleh Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut yang terdiri dari 3 (tiga) Kelompok Kerja, yaitu: (1) Kelompok Kerja Identifikasi Potensi dan Masalah Pengelolaan Potens Unggulan Kawasan Perbatasal Laut; (2) Kelompok Kerja Penyusunan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut; dan (3) Kelompok Kerja Dokumentasi dan Publikasi.
- 2) Melakukan Koordinasi dengan *Stakeholders* internal maupun eksternal untuk menyamakan persepsi.
- 3) Melakukan Koordinasi awal dan berkelanjutan dengan semua *Stakeholders* untuk membuat jejaring yang kuat.
- 4) Melaporkan progress kegiatan secara berkala kepada kepala *mentor*.

e. **Stakeholders Internal**

- 1) Memberikan dukungan secara komprehensif terhadap Proyek Perubahan yang dibuat oleh *Reformer* dengan ikut terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan implementasi dalam Proyek Perubahan.
- 2) Memberikan saran dan masukan yang membangun yang bermanfaat dalam kelancaran proses Proyek Perubahan.

f. **Stakeholders Eksternal**

- 1) Memberikan dukungan *Reformer* mulai dari proses identifikasi, penyusunan samapi dengan finalisasi Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut.
- 2) Memberikan informasi, saran dan masukan yang memberikan perbaikan pada hasil pekerjaan kepada *Reformer* terkait pelaksanaan Proyek Perubahan.

**1.8.5. Masa Berlaku dan Etika Serta Mekanisme Tim Efektif**

Pelaksanaan tugas dari Tim Kerja dimulai sejak tanggal Surat Keputusan Kepala BNPP ditetapkan sampai dengan masa berakhirnya pelaksanaan PKN II atau tepatnya di tanggal 8 Desember 2022 mendatang. Etika dan mekanisme kerja yang dibangun melekat pada tugas pokok dan fungsi dari tiap personil Tim Kerja, hal ini dimaksudkan untuk meperkuat hasil kinerja Tim Kerja dimaksud

**1.8.6. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Proyek Perubahan adalah suatu tahapan yang dilakukan untuk memastikan, rencana di tiap tahapan, target capaian dan waktu dapat terlaksana dengan baik. Peran *mentoring* dan *coaching* menjadi sangat penting, *mentoring* sangat berperan dalam mengatasi berbagai kendala dan masalah yang dihadapi *reformer*, yaitu dengan memberikan arahan dan penguatan subtansi, demikian halnya peran *coaching* dalam memotivasi reformer untuk terjalain kerjasama dan membangun

komunikasi 2 (dua) arah yang produktif untuk memastikan tercapainya proyek perubahan yang disepakati.

Monitoring dan evaluasi juga dilakukan oleh insider Tim Kerja untuk memastikan setiap tahapan yang terbangun pada milestone yang disepakati dapat terlaksana dengan baik, sehingga setiap tahapan proses dilakukan konsolidasi tim.

## 1.9. Rencana Pengembangan Potensi Diri Sebagai Tindak Lanjut dari Self Assessment

### 1.9.1. Hasil Identifikasi Pengembangan Potensi Diri

1. **Aspek Integritas**, dalam hal mengedepankan aspek integritas, maka berorientasi pada kemampuan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, komitmen, kedisiplinan, kejujuran, konsistensi, pengambilan keputusan dilematis.
  2. **Aspek Kerjasama**, dalam hal mengedepankan aspek kerjasama, hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai kerjasama internal, kerjasama eksternal, komunikasi, fleksibilitas, komitmen dalam tim.
  3. **Aspek Mengelola Diri**, dalam hal mengedepankan aspek mengelola perubahan, maka berorientasi pelayanan, adaptibilitasm pengembangan diri dan orang lain, orientasi pada hasil dan inisiatif.
- Hasil yang diperoleh dari penilain sikap terhadap aspek integritas, kerjasama dan mengelola diri di atas, sebagai berikut:

**Tabel 1.15.**  
Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta

	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
<b>Peserta</b>	8,50	8,40	8,40	8,43	<b>Baik</b>
<b>Mentor</b>	9,00	8,80	8,40	8,73	<b>Baik</b>
<b>Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen</b>	<b>8,85</b>	<b>8,68</b>	<b>8,40</b>	<b>8,64</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualifikasi Per Sub Komponen</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	

Keterangan:

**Kualifikasi**

9-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

**Hasil Skor** **8,64**

Dari hasil pengolahan Nilai Perilaku Peserta sebesar 8,64 berada pada kategori BAIK, hal ini berarti, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan proyek perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam JPT Pratama. Adapun proses penilaian dapat diketahui secara lengkap melalui link tersebut di bawah ini:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/18cgEWBSTrg5rJy2C9z7UcSNWV7afD1IN/edit?usp=sharing&oid=112285186531973628565&rtrof=true&sd=true>

## **1.9.2. Rencana Pengembangan Potensi Diri**

### **1. Aspek Integritas**

- a. Memaknai integritas sebagai komitmen dan loyalitas, dengan memperhatikan arahan pimpinan dan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai visi misi Sekretariat Tetap BNPP.
- b. Memaknai integritas sebagai tanggung jawab, bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, memenuhi penyampaian laporan sebagai hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan, untuk selanjutnya tetap dalam pola mentoring, untuk mendapatkan arahan dan binaan dari pimpinan.
- c. Memacu diri untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi menjadi lebih baik lagi dengan membiasakan diri (Habitulasi) dalam menjaga perilaku sehingga lebih disiplin dalam mentaati segala peraturan yang berlaku, dalam upaya menguatkan profesionalisme.

Penerapan aspek integritas ini, penting untuk menguatkan nilai integritasnya (transparan, taat azas, obyektif, anti korupsi, kemudahan dan efektifitas).

## **2. Aspek Kerjasama**

- a. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi, berkoordinasi dan beinteraksi dengan pihak internal Kedeputan Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, maupun pihak eksternal kedeputan, termasuk antar Kementerian/Lembaga terkait melalui kegiatan yang membangun keselarasan dan sinergitas kerja untuk kemajuan pembangunan di kawasan perbatasan laut sesuai kewenangan masing-masing.
- b. Memberikan ruang bagi bawahan menyampaikan pendapat dan pemikirannya dalam bersama mengatasi kendala/hambatan untuk mendapatkan solusi penanganan dan mengetahui hal yang dibutuhkan oleh bawahan untuk berkomitmen.
- c. Meningkatkan kemampuan mengkoordinasikan antar Kementerian/Lembaga menyampaikan, menggali, menerima, serta mendistribusikan informasi dengan cara menjadi koordinator pada FGD, Workshop atau Rapat Koordinasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

## **3. Aspek Mengelola Perubahan**

- a. Meningkatkan kemampuan untuk menjadi pemimpin yang berorientasi pelayanan dengan cara selalu mengevaluasi output dan outcome dari semua kegiatan tugas pokok dan fungsi sehingga bermanfaat bagi para pihak terkait.
- b. Mengembangkan sensitivitas terhadap peluang serta keinginan untuk pengembangan kompetensi baik untuk diri sendiri maupun staf dengan cara membuat Tim dalam pelaksanaan tugas sesuai Tugas Pokok dan Fungsi.
- c. Penerapan konsekuensi atas kinerja yang buruk dan dukungan atas sikap dan hasil yang positif dari anggota tim/bawasan.
- d. Membangun profesionalisme untuk menciptakan struktur manajemen yang efektif.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN**

Isu-isu strategis dalam pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut, antara laut, antara lain mengenai”

1. Pengelolaan dan pengembangan potensi komoditas lokal di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata;
2. Pemanfaatan sumberdaya hayati dan nonhayati pesisir dan laut untuk kepentingan perekonomian masyarakat;
3. Produktivitas produk unggulan daerah yang berorientasi pada pasar negara tetangga (pengembangan *branding*);
4. Daya saing dan perkembangan pusat/sentra industri, perdagangan dan pariwisata di kecamatan Lokasi Prioritas (LOKPRI) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
5. Konektivitas dan layanan infrastruktur transportasi terutama yang mendukung rantai lalu lintas pasokan komoditas (distribusi logistik/*supply chain*) dan hubungan sosial budaya antarwilayah;
6. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan akses telekomunikasi, informasi dan penyiaran;
7. Akses terhadap sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar berupa pendidikan, kesehatan, perekonomian, perdagangan, dan permukiman yang memadai; dan
8. Fasilitasi pelayanan pemerintahan kecamatan dan Desa atau sebutan lain di Kawasan Perbatasan.

Yang dengan kecenderungan dalam kondisi keterbatasan atau tidak tersedia, sehingga perlu memperhatikan pola penanganan dengan lebih mengedepankan karakteristik atau lokalitas potensi sumberdaya dan kebutuhan lokalitas.

Selain itu dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) diperhatikan pada hal yang menjadi perhatian dalam pengembangan kelembagaan pengelolaan BWN-KP, antara lain:

1. Hubungan kelembagaan horizontal (antar-lembaga dalam pemerintah pusat) yang belum efektif;

2. Hubungan kelembagaan vertikal (hubungan antara pusat dan daerah) dan di daerah yang belum efektif; dan

Sebagai fungsi pengendalian pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi dampak program dan kegiatan, kelembagaan pengendali lapangan masih belum terlaksana dengan optimal, sehingga terobosan yang diambil untuk memastikan terlaksananya Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kapasitas Perbatasan terlaksana dengan baik, hadir Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKS Kawasan Perbatasan Laut dengan langkah-langkah pelaksanaan yang telah dibangun sebagai berikut:

### **2.1. Capaian Tahapan Rencana Strategis**

Implementasi proyek perubahan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKS Kawasan Perbatasan Laut disertai dengan *evidence* yang lengkap berisi:

1. Foto kegiatan.
2. Vidio kegiatan,
3. Surat undangan narasumber,
4. Surat undangan peserta, dan
5. Notulensi dan/atau kesepakatan rapat.

yang disematkan alamat link yang tersedia pada uraian tahapan sebagai berikut:

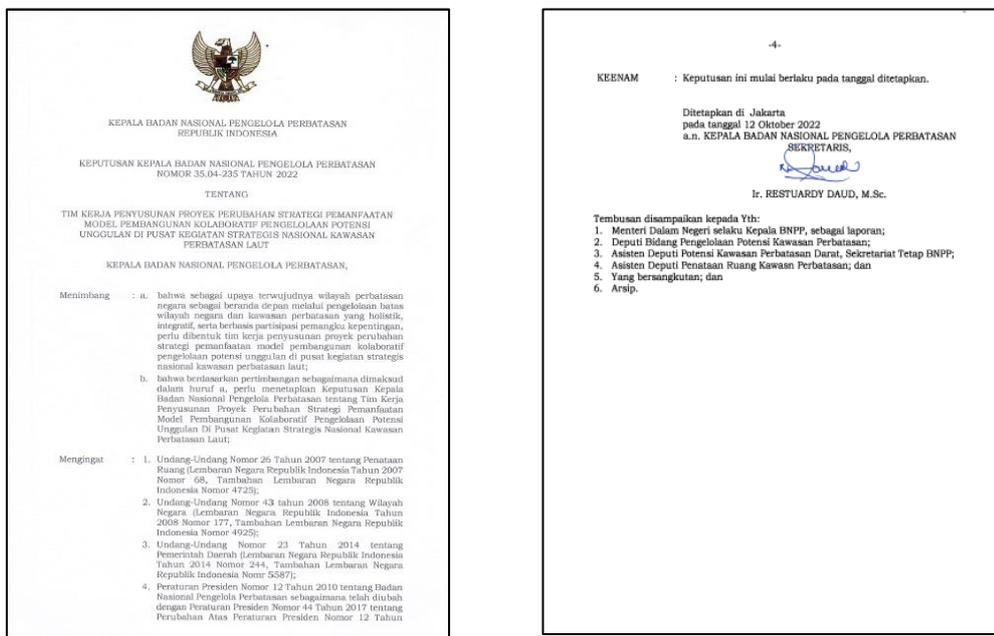
#### **2.1.1. Membangun Tim Proyek Perubahan**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 35.04-235 Tahun 2022 tentang Tim Kerja Proyek Perubahan Penyusunan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Laut, sebagaimana gambar di bawah ini.

**Gambar 2.1.**

Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 35.04-235 Tahun 2022 Tim Kerja Proyek Perubahan Penyusunan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Laut

[https://drive.google.com/file/d/13zBVPQPIhhvedM4FuRTwu-5jA4dnjsY/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/13zBVPQPIhhvedM4FuRTwu-5jA4dnjsY/view?usp=share_link)



## 1. Uraian dan Output Kegiatan

Kegiatan membangun tim kerja proyek perubahan dilakukan sejak bimbingan awal berlangsung, sehingga isu yang akan diangkat sudah berdasarkan kesepemahaman bersama di keasdepan potensi kawasan perbatasan laut yang dilakukan mulai tanggal 3 Oktober 2022 setelah disepakatinya tema yang digagas *reformer* oleh *mentor*, dan dilanjutkan bimbingan oleh *coach*, dan setelah disepakati bersama dengan penguji pada saat seminar tanggal 11 Oktober 2022. Tim kerja proyek perubahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNPP, yang dilanjutkan dengan proses penyusunan Model dalam *project leader* dengan melaksanakan 5 (lima) tahapan kegiatan, yaitu:

- a. Koordinasi dan konsultasi dengan *mentor* dan *coach*

***Mentor***, memberikan arahan mengenai:

- 1) Tema yang digagas pada proyek perubahan yang awalnya “Strategi Pemanfaatan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di Pusat

Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Laut” menjadi “Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Laut”.

- 2) Rasionalitas dari hal yang diformulasikan dengan waktu penyelesaian, serta mengoptimalkan agenda kegiatan yang akan dilaksanakan, dan mensinergikan dengan timeline untuk mengawal kepastian penyelesaian proyek perubahan dimaksud.
- 3) Pembahasan bersama mengenai hal-hal yang menjadi landasan pemikiran dan penguatan substansi.
- 4) Percepatan keputusan Kepala BNPP mengenai
- 5) pembentukan tim kerja dimaksud.

**Coach**, melakukan bimbingan kepada *project leader*:

- 1) Melakukan diskusi dan memberikan masukan dalam penyusunan Laporan Proyek Perubahan;
  - 2) Memonitor kegiatan selama penyusunan Laporan Proyek Perubahan;
  - 3) Memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan persetujuan kepada *Reformer* dalam penyusunan Proyek Perubahan;
  - 4) Memfasilitasi jika *Reformer* mengalami kesulitan;
  - 5) Mendukung pelaksanaan Proyek Perubahan;
- b. Pembentukan **Tim Kerja Proyek Perubahan**
- 1) Konsolidasi internal dalam menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman atas kebutuhan proyek perubahan yang akan dihasilkan bersama
  - 2) Menelaah kapasitas personil untuk dipastikan dapat memberikan dukungan pelaksanaan penugasan, dengan mengutamakan tugas dan fungsi sesuai jabatan fungsional yang diampu.

- 3) Menyusun pembentukan tim yang akan diajukan dan dilegalisasi melalui Keputusan Kepala BNPP.
- 4) Susunan tim kerja yang dibentuk sebagai berikut:
  - a) Pengarah
    - Plh. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, yang awalnya Bapak Dr. Tumpak H Simanjuntak, MA, CRGP, QGIA, CFA, CGCAE, dikarenakan mutasi pegawai menjadi Bapak Dr. Gutmen Nainggolan, SH., M. Hum.
  - b) Ketua selaku *project leader*
    - Dra. Farida Kurnianingrum, MM
  - c) Sekretaris
    - Drs. Sriyanto, M.Si.
  - d) Kelompok Kerja Identifikasi Potensi dan Masalah di PKSN Kawasan Perbatasan Laut
    - Hariman Latuconsina, S.STP
    - Sumono, SH
    - Rohani Manurung, S.Ak
    - Grace Julyana, M Butarbutar, ST
    - Roy Shumadan L. Bancin, S.STP
  - e) Kelompok Kerja Penyusunan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut
    - Andrew FM.Lessil, S,STP, M.Si.
    - Agung Arfian Adiutama, S.STP
    - Wima Ayu Kristiana, A.P.Kb.N
    - Ana Maisyaroh Indrayanti, S.Si
    - Andy Dwi Bayu Bawono, SE.,m.Si., Ph.D.
    - Purri Andryaty, SP., M.Si.
    - Meytia Eka, S.Pi.
  - f) Kelompok Kerja Publikasi dan Dokumentasi
    - Deki sahputra, S.SiT., MT.
    - Susilawasi, S.Pd.

- Lismardiyah, S.Sos
- M. Arbi Nugraha, SE
- Andi Ichsan, SE
- Rath Ddwijyanthi, S.Pd.
- Nirma Listiana, S.Ikom

c. Membangun *values*/nilai-nilai tim

Penanaman nilai-nilai dalam kerja tim sangat penting, untuk menghasilkan tim yang efisien dan efektif. Nilai (*value*) dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi keberhasilan capaian kinerja tim untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Nilai-nilai yang dibangun yaitu:

- *Team work* (Kerjasama tim),
- Kejujuran,
- Komitmen, dan
- Professional.

d. Penerbitan Keputusan BNPP mengenai tim kerja proyek perubahan

Tim Kerja ditetapkan melalui Keputusan Kepala BNPP Nomor 35.04-235 Tahun 2022 tentang Penyusunan Proyek Perubahan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Laut.

e. Distribusi penugasan

Tim kerja merupakan tim yang membantu *project leader* dalam merealisasikan proyek perubahan mulai persiapan hingga tercapainya kemanfaatan proyek perubahan sesuai dengan tahapan *milestones* yang direncanakan. Tim Kerja terbagi dalam 3 (tiga) kelompok kerja dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Kelompok Kerja Identifikasi Potensi dan Masalah di PKSN Kawasan Perbatasan Laut
  - a) Melakukan identifikasi potensi dan masalah pengelolaan potensi unggulan kawasan perbatasan laut

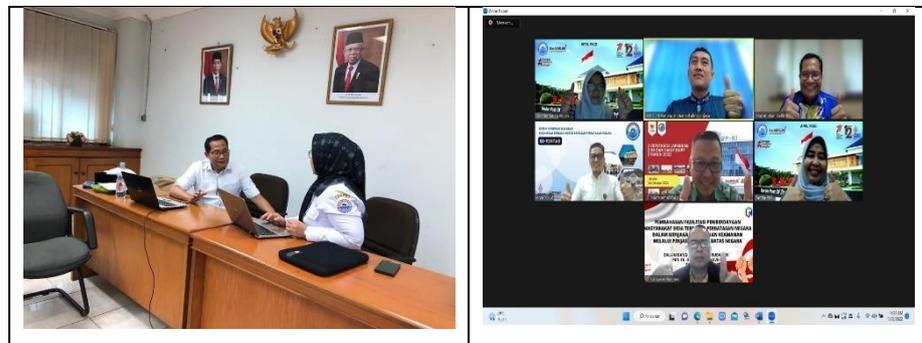
- b) Melakukan analisa hasil identifikasi potensi dan masalah pengelolaan potensi unggulan kawasan perbatasan laut.
  - c) Melaporkan hasil analisa identifikasi potensi dan masalah pengelolaan potensi unggulan kawasan perbatasan laut.
- 2) Kelompok Kerja Penyusunan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut
- a) Menyusun draf Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Laut.
  - b) Melakukan pembahasan draf Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Laut bersama Kementerian/Lembaga terkait, PKSN, dan PLBN di kawasan perbatasan laut.
  - c) Melakukan koordinasi dengan Kedeputan dan Keasdepan terkait.
  - d) Melakukan finalisasi Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Laut.
  - e) Melaporkan hasil penyusunan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan Di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan a. Perbatasan Laut.
- 3) Kelompok Kerja Publikasi dan Dokumentasi
- a) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pendokumentasian.
  - b) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan publikasi, dan media.

## 2. Evidence/Dokumentasi

**Gambar 2.2.**  
Konsultasi dengan *Mentor*



**Gambar 2.3.**  
Bimbingan dan Konsultasi dengan *Coach*



**Gambar 2.4.**  
Konsolidasi internal keasdepan Potensi Kawasan Perbatasan Laut.



### 2.1.2. Identifikasi Potensi dan Masalah di PKSN Kawasan Perbatasan Laut

Agenda ini dilaksanakan dalam 3 pentahapan pada 7 (tujuh) PKSN Kawasan Perbatasan Laut, sedangkan untuk PKSN Bengkalis dilakukan secara khusus melalui pengkajian pengembangan ekonomi di PKSN Bengkalis sebagai bahan pembelajaran dalam penulisan model dan penerapan model.

Kegiatan identifikasi ini menghadirkan seluruh tim kerja dan dihadiri peserta organisasi perangkat daerah yang bersangkutan, yaitu:

1. Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD)
2. Badan Perencanaan dan Litbang (Bappelitbang)
3. Dinas Perikanan
4. Dinas Perdagangan dan Industri
5. Dinas Perhubungan
6. Dinas Pariwisata
7. Dinas Pertanian

Kegiatan identifikasi potensi dan masalah dilaksanakan penganggaran secara hybrid, yaitu khusus PKSN Bengkalis terdapat penganggaran khusus yang sudah terakomodir pada DIPA 2022, sedangkan kegiatan lainnya dilaksanakan secara mandiri melalui daring.

1. Identifikasi untuk PKSN Sabang Provinsi Aceh dan PKSN Ranai – Natuna Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2022, melalui daring dan secara keseluruhan dokumen dapat diunduh pada alamat link berikut ini:

<https://drive.google.com/drive/folders/1932144zo43ynjJRKaZl2DKjipLSQzj78?usp=sharing>

**Gambar 2.5.**

Identifikasi untuk PKSN Sabang dan PKSN Ranai



2. Identifikasi untuk PKSN Tahuna– Sangihe Provinsi Sulawesi Utara dan PKSN Saumlaki – Kabupaten Tanimbar Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2022, melalui daring dan secara keseluruhan dokumen dapat diunduh pada

alamat link berikut ini:

[https://drive.google.com/drive/folders/1JaP60wblhEi97j\\_BLHBc-gc8LLmLLz21?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1JaP60wblhEi97j_BLHBc-gc8LLmLLz21?usp=sharing)

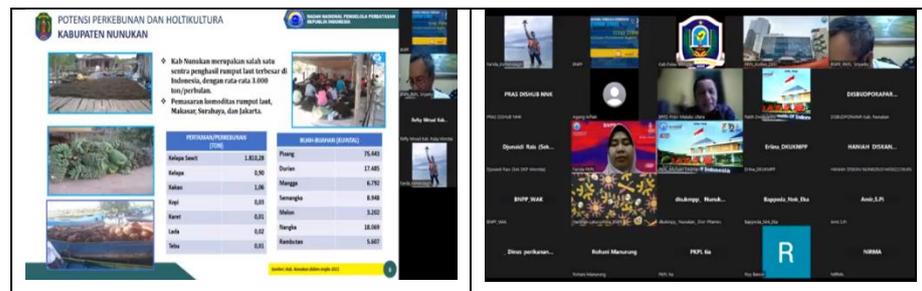
**Gambar 2.6.**  
Identifikasi untuk PKS N Tahuna dan PKS Saumlaki



3. Identifikasi untuk PKS N Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dan PKS Daruba – Kabupaten Morotai Provinsi Maluku Utara dilaksanakan pada tanggal 4 November 2022, melalui daring dan secara keseluruhan dokumen dapat diunduh pada alamat link berikut ini:

<https://drive.google.com/drive/folders/1fZezJJyoqng7EwD9iWRONlbz15jzQus?usp=sharing>

**Gambar 2.7.**  
Identifikasi untuk PKS N Nunukan dan PKS Daruba



4. Identifikasi untuk PKS N Bengkalis Provinsi Riau dilaksanakan secara *offline* di lokasi yang bersangkutan dengan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan ekonomi di PKS N Bengkalis.. yang dilaksanakan pada tanggal 16-18 Oktober 2022, proses kegiatan ini melibatkan 5 unsur secara pentahelix, hal ini sekaligus menerapkan pendekatan model *levelling* dan modele alur proses. Untuk lebih jelasnya proses kegiatan di PKS N

Bengkalis dapat diunduh melalui link berikut ini:

<https://drive.google.com/drive/folders/1R3iw0bplzbAueOJyd40Cica5zbPn9ooJ?usp=sharing>

**Gambar 2.8.**  
Identifikasi untuk PKS N Bengkalis



Dari pelaksanaan identifikasi ini, diketahui hal-hal sebagai berikut sebagai hasil identifikasi potensi dan masalah di PKS N Kawasan Perbatasan Laut secara umum memiliki keragaman sumber daya alam, mulai dari kelautan perikanan, pertanian/perkebunan pertambangan, dan pariwisata, khususnya pariwisata bahari., yaitu:

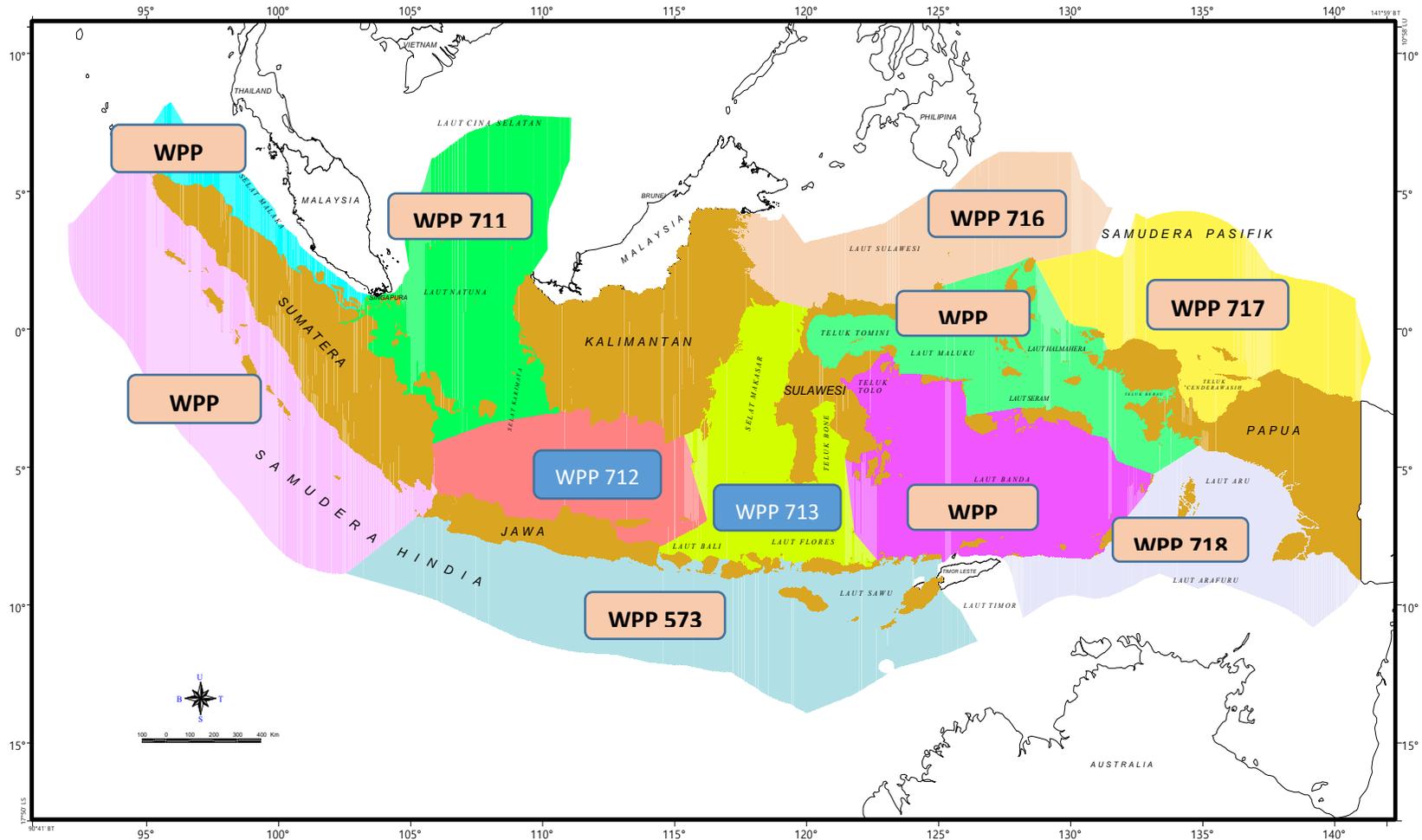
**a. Potensi kelautan perikanan**

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat dan daerah. Potensi kelautan dan perikanan meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, dan garam. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia menetapkan 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Dari 11 WPP tersebut, 9 (sembilan) WPP diantaranya bersinggungan atau terletak di kawasan perbatasan laut. Ke-9 WPP tersebut adalah WPP 571, WPP 572, WPP 573, WPP 711, WPP 715, WPP 716, WPP 717, WPP 718 dan WPP 718.

Potensi komoditas perikanan berupa ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersial, ikan karang hingga udang dan cumi-cumi hampir merata ada di seluruh WPP.

Berikut adalah sebaran Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan:

**Gambar 2.9.**  
**Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)**



 **WPP Kawasan Perbatasan**

Selain potensi perikanan yang cukup besar, komoditas kelautan yang cukup besar adalah rumput laut. Untuk komoditas rumput laut, sentra produksi rumput laut yang cukup besar ada di PKS N Nunukan, dan PKS Saumlaki. Komoditas tersebut dibawa ke Makasar dan Surabaya untuk selanjutnya diekspor antara lain ke RRT. Namun ekspor rumput laut lebih banyak berupa bahan baku (*raw material*), oleh karena itu perlu terus dikembangkan produk turunannya, sehingga lebih bernilai tambah.

Berikut gambaran produksi hasil kelautan dan perikanan di 8 (delapan) PKS Kawasan Perbatasan Laut:

**Tabel 2.1.**

Jumlah Produksi Komoditas Kelautan dan Perikanan Di 8 (delapan) PKS Kawasan Perbatasan Laut

NO	PKSN	PERIKANAN	KELAUTAN	KETERANGAN
1	PKSN Sabang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perikanan tangkap</li> <li>▪ Perikanan budidaya darat</li> </ul>	-	WPP 571 dan WPP 572
2	PKSN Bengkalis	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perikanan tangkap</li> <li>▪ Perikanan budidaya</li> </ul>	-	WPP 571
3	PKSN Ranai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perikanan tangkap</li> <li>▪ Perikanan budidaya</li> </ul>	-	WPP 711
4	PKSN Nunukan	Perikanan tangkap	Rumput laut	WPP 716
5	PKSN Tahuna	Perikanan tangkap	-	WPP 716
6	PKSN Melonguane	Perikanan tangkap	-	WPP 716
7	PKSN Daruba	Perikanan tangkap	Rumput laut	WPP 716, WPI 717, dan WPP 715
8	PKSN Saumlaki	Perikanan tangkap	Rumput laut	WPP 718

#### **b. Potensi Pertanian/Perkebunan**

Sebagai daerah kepulauan, potensi yang ada di PKS Kawasan Perbatasan Laut cukup variatif. Potensi yang ada tidak saja di sektor kelautan dan perikanan, tetapi juga sektor pertanian/perkebunan. Bahkan di sektor perkebunan untuk

komoditas tertentu dihasilkan dari PKS N Kawasan Perbatasan Laut, seperti pala dan cengkeh.

Potensi pertanian/perkebunan di kawasan perbatasan laut pada umumnya didominasi hasil perkebunan antara lain kelapa dalam, karet, pala, cengkeh, coklat, kopi, dan sagu. Sementara komoditas hortikultura antara lain padi, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan buah-buahan seperti pisang, durian, dan nangka. Sementara untuk peternakan, pada umumnya hasil ternak yang dipelihara lebih banyak untuk memenuhi konsumsi lokal. beberapa jenis ternak yang ada sapi, babi dan unggas.

**Tabel 2.2.**  
Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura/Perkebunan  
Di 8 (delapan) PKS N Kawasan Perbatasan Laut

NO	PKSN	HORTKULTURA	PERKEBUNAN
1	PKSN Sabang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pisang, Pepaya, Mangga,</li> <li>▪ Ketimun, cabai, terong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelapa, Kakao, Pinang, Pa</li> </ul>
2	PKSN Bengkalis	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pisang, mangga, durian</li> <li>▪ Cabai, Bayam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Karet, kelapa sawit, kopi</li> </ul>
3	PKSN Ranai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Durian, Mangga, Semangka</li> <li>▪ Cabai, Ketimun, Terong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelapa, Karet, dan Cengkeh</li> </ul>
4	PKSN Nunukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pisang, Nangka, Durian, Semangka, Mangga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelapa sawit, Kelapa, dan Kakao</li> </ul>
5	PKSN Tahuna	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pisang, Sukun, Pepaya, Durian</li> <li>▪ Tomat, Cabai, dan Ketimun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelapa dalam, Pala, Cengkeh dan Sagu</li> </ul>
6	PKSN Melonguane	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pisang, Pepaya, Mangga</li> <li>▪ Cabai, Tomat, dan Bawang merah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelapa, Cengkeh, Pala, Pisang Abaca</li> </ul>
7	PKSN Daruba	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Durian, Mangga, Pisang, Duku</li> <li>▪ Tomat, Cabai, Bawang merah, dan Terong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelapa, Cengkeh, dan Pala</li> </ul>
8	PKSN Saumlaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pisang, Pepaya, Jambu, dan Mangga</li> <li>▪ Petai, Sawi, Buncis, kacang kacangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelapa, Jambu mete, dan Kakao</li> </ul>

### c. Potensi Pariwisata

Secara geografis, wilayah PKS N Kawasan Perbatasan Laut berupa kepulauan yang jauh dari pusat-pusat perekonomian dan industri. Perkembangan ini membuat kondisi lingkungan alam pada sebagian besar wilayah masih terjaga dari

kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pantai dengan pasir putih yang bersih, air laut yang jernih, dan terumbu karang masih banyak bisa ditemukan. Namun demikian, ancaman kerusakan lingkungan tidak berarti tidak ada, abrasi pantai, intrusi air laut, dan sampah, khususnya sampah plastik menjadi ancaman utama bagi lingkungan.

Sebagai wilayah yang dikelilingi perairan, objek daya tarik wisata (ODTW) di PKSN Kawasan Perbatasan Laut pada umumnya didominasi pariwisata bahari. Pariwisata pantai, diving, snorkling dan aktivitas menyelam lainnya lebih mendominasi kegiatan pariwisata di PKSN Kawasan Perbatasan Laut. Pariwisata lainnya yang cukup menonjol adalah pariwisata sejarah, dimana sebagaimana diketahui seperti PKSN Daruba, Kabupaten Pulau Morotai pada era Perang Dunia II menjadi basis pangkalan utama, baik bagi Jepang maupun Amerika Serikat.

**Tabel 2.3.**

Potensi Pariwisata Di 8 (delapan) PKSN Kawasan Perbatasan Laut

NO	PKSN	JENIS DAYA TARIK WISATA	KETERANGAN
1	PKSN Sabang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pariwisata bahari</li> <li>▪ Pariwisata sejarah</li> </ul>	Kilometer 0, Pantai Iboih, Benteng Jepang, Gua Sarang,
2	PKSN Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pariwisata bahari</li> <li>▪ Pariwisata Budaya</li> </ul>	Pantai Tanjung Medang, Pantai Teluk Rhu, Festival Lampu Colok
3	PKSN Ranai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pariwisata bahari</li> <li>▪ Pariwisata alam geosite</li> </ul>	P. Senoa, Pantai Tanjung, Alif Stone, Pantai Batu Kasah
4	PKSN Nunukan	Pariwisata alam	Kebun Raya Binusan, Giram Luyu, dan Bukit Damai
5	PKSN Tahuna	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pariwisata bahari</li> <li>▪ Pariwisata Budaya</li> </ul>	Gunung api bawah laut Mahangetang, Jangkar kuno Pantai Lesa, dan Goa Bawah Air Kalongan. Dan Pesta Tulude
6	PKSN Melonguane	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pariwisata bahari dan alam</li> <li>▪ Pariwisata religi</li> </ul>	P. Sara, Goa Tattombatu Patung Kristus Raja
7	PKSN Daruba	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pariwisata bahari</li> <li>▪ Pariwisata sejarah</li> </ul>	P. Dodola, P. Zumzum, Gua Popogu, Museum PD II, Pemandian Mc Arthur
8	PKSN Saumlaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pariwisata bahari</li> <li>▪ Pariwisata sejarah</li> <li>▪ Pariwisata religi</li> </ul>	Segitiga MAN, Desa Wisata Tumbur, Tangga dan perahu batu, dan Patung Kristus Raja

#### d. Identifikasi Isu-Isu Strategis

Sebagai wilayah kepulauan, PKSN di kawasan perbatasan laut memiliki karakteristik tersendiri, dimana pergerakan atau mobilitas barang dan orang sangat tergantung pada moda transportasi laut dibandingkan moda transportasi darat dan udara. Letak geografis yang pada sebagian wilayah PKSN terletak di jalur pelayaran internasional, dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan memiliki hubungan sosial ekonomi dengan negara tetangga, menjadikan PKSN di kawasan perbatasan memiliki tantangan dan peluang yang lebih kompleks dalam dimensi Ipoleksosbud Hankam. Seperti PKSN Sabang yang memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk dan keluar jalur pelayaran internasional. Demikian pula PKSN Ranai, PKSN Bengkalis, PKSN Nunukan, PKSN Saumlaki yang menjadi jalur perlintasan dari kawasan Australia menuju Asia Timur.

Berikut isu-isu strategis permasalahan, peluang dan tantangan pada 8 (delapan) PKSN di kawasan perbatasan laut.

**Tabel 2.4.**

Isu-Isu Strategis 8 (delapan) PKSN Kawasan Perbatasan Laut

NO	PKSN	ISU-ISU STRATEGIS
1	PKSN Sabang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Secara geografis terletak di pintu masuk dan keluar Selat Malaka yang menjadi jalur transportasi laut internasional dan ke Asia Timur;</li><li>2. Keberadaan P. Weh dan P. Rondo sebagai PPKT yang memerlukan penanganan tersendiri;</li><li>3. Potensi sumber daya alam sektor kelautan perikanan (perikanan tangkap) dan pariwisata bahari.</li><li>4. PKSN Sabang merupakan kawasan bebas dan pelabuhan bebas berdasarkan UU No. 27 Th 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; dan</li><li>5. Rentan terhadap berbagai tindak kejahatan trans nasional, seperti illegal fishing.</li><li>6. SKPT Sabang yang sudah terbangun hingga saat ini tidak operasional.</li></ol>
2	PKSN Bengkalis	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Secara geografis terletak di Selat Malaka yang secara langsung berbatasan dengan Malaysia;</li><li>2. Potensi sumber daya alam kelautan perikanan, pertanian/perkebunan;</li><li>3. pariwisata dan pertambangan yang belum termanfaatkan secara optimal;</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Keterbatasan sarana prasarana dasar pada sebagian wilayah, seperti air bersih, listrik, komunikasi informasi;</li> <li>5. Kerusakan dan penurunan mutu lingkungan akibat abrasi, intrusi air laut, dan sampah laut;</li> <li>6. Rentan terhadap kejahatan transnasional, seperti <i>smuggling</i>, <i>human trafficking</i>.</li> </ol>
3	PKSN Ranai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara geografis terletak di kawasan konflik Laut China Selatan, yang melibatkan China;</li> <li>2. Jalur transportasi laut internasional pada jalur ALKI I;</li> <li>3. Pemanfaatan potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan, perkebunan, dan pariwisata bahari bagi kesejahteraan masyarakat;</li> <li>4. Permasalahan mendasar, seperti keterbatasan infrastruktur dasar, aksesibilitas transportasi, komunikasi dan informasi, pendidikan, dan kesehatan;</li> <li>5. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM, kelembagaan ekonomi masyarakat, akses permodalan dan sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi masyarakat;</li> <li>6. Rentan terhadap berbagai potensi ancaman kejahatan lintas negara, seperti pencurian ikan; dan</li> <li>7. Ancaman kerusakan lingkungan, seperti abrasi, intrusi air laut, dan penyebaran sampah.</li> </ol>
4	PKSN Nunukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara geografis di jalur transportasi laut internasional yang bersinggungan dengan jalur ALKI II melalui Laut Sulawesi;</li> <li>2. Interaksi sosial ekonomi antar masyarakat Nunukan, Sebatik dan sekitarnya dengan masyarakat Malaysia, termasuk Tawau dan sekitarnya. Ketergantungan penduduk akan kebutuhan barang pokok, seperti gula, gas dsb;</li> <li>3. Sebagian komoditas, seperti hasil perikanan dan perkebunan banyak dipasarkan di Tawau, Malaysia;</li> <li>4. Perdagangan tradisional Indonesia – Malaysia (BTA 1970) yang belum pernah di review;</li> <li>5. Rentan terhadap berbagai tindak kejahatan trans nasional, human trafficking, penyelundupan barang dan narkoba.</li> </ol>
5	PKSN Tahuna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara geografis, terletak pada jalur ALKI III yang menjadi lintasan kapal internasional dari Australia ke Asia Timur dan Pasifik;</li> <li>2. Interaksi sosial ekonomi antar masyarakat, khususnya Marore dengan masyarakat General Santos, Philipna.</li> <li>3. Keberadaan masyarakat keturunan Sangir Talaud yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan (<i>Undocumented</i>), dikenal dengan istilah “Sapi” dan “Pisang”;</li> <li>4. Perdagangan tradisional Indonesia – Philipina (BTA 1974) yang belum pernah di review;</li> <li>5. Pemanfaatan potensi sektor kelautan perikanan, perkebunan, dan pariwisata bahari.</li> <li>6. Aksesibilitas infrastruktur jalan dan transportasi (darat, laut dan udara), komunikasi dan informasi, listrik;</li> <li>7. Kegiatan illegal fishing dan <i>smuggling</i> di Laut Sulawesi;</li> <li>8. Kerusakan lingkungan akibat gempa, abrasi, terumbu karang, sampah plastik</li> </ol>
6	PKSN Melonguane	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara geografis, terletak pada jalur ALKI III yang menjadi lintasan kapal internasional dari Australia ke Asia Timur dan Pasifik;</li> <li>2. Interaksi sosial ekonomi antar masyarakat, khususnya Miangas yang secara jarak lebih dekat ke Davao. Dalam hal ini pula, Keberadaan masyarakat keturunan Sangir Talaud, dikenal dengan istilah “Sapi” dan “Pisang”;</li> <li>3. Perdagangan tradisional Indonesia – Philipina (BTA 1974) yang belum pernah di review;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pemanfaatan potensi sektor kelautan perikanan, perkebunan, dan pariwisata bahari.</li> <li>5. Aksesibilitas infrastruktur jalan dan transportasi (darat, laut dan udara), komunikasi dan informasi, listrik;</li> <li>6. Kegiatan illegal fishing dan smugling di Laut Sulawesi;</li> <li>7. Kerusakan lingkungan, abrasi, terumbu karang, sampah plastik</li> </ol>
7	PKSN Daruba	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara geografis terletak di perbatasan Indonesia-Palau yang menghadap Samudera Pasifik;</li> <li>2. Di jalur transportasi laut internasional yang bersinggungan dengan jalur ALKI III;</li> <li>3. Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan dan pariwisata (pariwisata bahari dan sejarah);</li> <li>4. Keterbatasan infrastruktur dasar, aksesibilitas transportasi, komunikasi dan informasi, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan;</li> <li>5. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM, kelembagaan ekonomi masyarakat, akses permodalan dan sarana prasarana kegiatan ekonomi masyarakat;</li> <li>6. Rentan terhadap berbagai tindak kejahatan <i>illegal fishing</i>.</li> </ol>
8	PKSN Saumlaki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara geografis, terletak pada jalur ALKI III yang menjadi lintasan kapal internasional dari Australia ke Asia Timur (Jepang, China, Korea Selatan);</li> <li>2. Dari segi jarak, jarak PKSN Saumlaki dengan Darwin, Australia lebih dekat dibandingkan dengan ke Ambon, sebagai ibu kota provinsi;</li> <li>3. PKSN Saumlaki akan menjadi <i>home base</i> bagi 2 (dua) kegiatan skala besar, yaitu pengembangan batalyon komposit dan pengemboran migas Blok Masela;</li> <li>4. Laut Arafura merupakan lumbung ikan nasional, potensi sebesar 2.637.565/ton. Jumlah terbesar dibandingkan wilayah perairan perikanan (WPP) lainnya;</li> <li>5. Kaya akan potensi pariwisata bahari, banyak kapal yacht datang, namun untuk pengurusan paspor masih dilakukan di Ambon;</li> <li>6. Keterbatasan infrastruktur dasar, aksesibilitas transportasi, komunikasi dan informasi, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan;</li> <li>7. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM, kelembagaan ekonomi masyarakat, akses permodalan dan sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi masyarakat;</li> <li>8. Ancaman kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam maupun ulah manusia, seperti abrasi, intrusi air laut.</li> </ol>

### 2.1.3. Penguatan Bahasan Lainnya mengenai Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut melalui Kegiatan Pendukung

Dalam Menguatkan substansi yang dibangun pada Model Pengelolaan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut dapat diperoleh melalui optimalisasi kegiatan yang difasilitasi keasdepan Potensi Kawasan Perbatasan Laut, yaitu:

#### 1. Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2023

Dalam pembahasan Rencana Aksi Tahun 2023 yang dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 24 Oktober 2022 untuk menelaah mengenai proses perencanaan yang ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Kepala BNPP Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dapat diketahui lebih lanjut melalui alamat link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1DZP5hS5yv28x6fPhhpowm18PkGYXQmS?usp=sharing>

**Gambar 2.10.**

Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2023



Proses perencanaan menjadi masukan yang krusial sebagai suplemen pendekatan alur proses pada model pembangunan kolaboratif yang dibangun bagaimana mekanisme pelaksanaan perencanaan dengan orientasi waktu pelaksanaan dan substansi yang dikoordinasikan untuk dipastikan kesesuaian perencanaan yang menjadi arahan Presiden pada Rencana Induk BWN-KP Tahun 2020-2024 dengan Rencana Aksi sebagai tindak lanjut yang perlu dikuatkan komitmen implementasinya pada T-2 dan T-1 waktu pelaksanaan.

2. Usulan Gerbang Dutas di Kabupaten Kepulauan Talaud  
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10-11 November 2022 secara hybrid, khusus membedah dan memfasilitasi usulan program kegiatan pada Gerbang Dutas Tahun 2022 di kabuapten Talaud. Hal ini dapat diketahui lebih jauh sebagaimana pada alamat link berikut:

<https://drive.google.com/drive/folders/1RK7154-hWRGngxppc0a9TvrnBzLtHvsF?usp=sharing>

**Gambar 2.11.**

Usulan Program Kegiatan pada Gerbang Dutas Tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Talaud



Gerbang Dutas 2022 dilaksanakan melalui kunjungan Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan mengakomodir permasalahan implementasi yang dihadapi di wilayah perbatasan negara dimaksud. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan diakomodirnya usulan dimaksud dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat di lokasi perbatasan tersebut. Kehadiran kementerian/lembaga terkait diharapkan mampu memfasilitasi kebijakan yang sudah dibangun pada Rencana Induk BWN-KP. Hal ini tentu dipengaruhi dengan kesiapan anggaran dan sarana dan prasarana pendukung yang tersedia.

### 3. Pengembangan Ekonomi di PKSN Bengkalis

Proses penyusunan kajian dilaksanakan melalui 4 pentahapan, yaitu penyampaian Laporan Pendahuluan, *Focus Grup Discussion* di PKSN Bengkalis, penyampaian Laporan Antara, dan ditutup dengan penyampaian Laporan Akhir. Dengan melakukan proses reviu terhadap kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pengembangan ekonomi di kabupaten tersebut, serta mengedepankan model pembangunan kolaboratif yang dilaksanakan secara *pentahelix* untuk setiap tahapan proses melalui pendekatan *leveling* dan alur proses pada model yang tengah didisain, memiliki nilai manfaat dan ketepatan dalam menangani permasalahan untuk mendapatkan solusi terbaik. Melalui kegiatan tersebut dapat menyajikan model pembangunan kolaboratif dalam pengelolaan potensi unggulan di PKSN Kabupaten Bengkalis terkait pengembangan ekonomi Udag Vaname dan Pariwisata. Berikut proses pentahapan akhir yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2022 secara hybrid dan dapat ditinjau lebih jauh pelaksanaannya sebagaimana alamat link berikut:

[https://drive.google.com/drive/folders/1Gsg9w\\_nlqVm3T9J\\_2-jDZEaFwyKF9o7?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1Gsg9w_nlqVm3T9J_2-jDZEaFwyKF9o7?usp=sharing)

**Gambar 2.12.**

Pengembangan Ekonomi di PKSN Kabupaten Bengkalis



#### **2.1.4. Penyusunan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut**

Proses penjaringan potensi dan masalah dalam pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut, mempejelas kondisi faktual yang bersangkutan di 8 (delapan) PKSN dimaksud, yaitu: Sabang, Ranai, Bengkalis, Nunukan, Tahuna, Malonguane, Daruba, dan Saumlaki. 8 (delapan) PKSN ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga diperlukan pendekatan model lebih lanjut.

Dalam setiap kegiatan, *Project leader* tergabung bersama tim kerja mengoptimalkan substansi yang dibahas untuk menguatkan justifikasi terhadap pengelolaan yang dilakukan.

Pada tanggal 20-22 November 2022, tim kerja fokus dalam pembahasan final model pembangunan kolaboratif dimaksud bersama kementerian/lembaga dan 8 (delapan) PKSN tersebut.

Adapun hal-hal yang disajikan dalam buku Model, memuat:

memuat:

1. pendahuluan, terdiri atas latar belakang, maksud dan tujuan, dan ruang lingkup;
2. tinjauan kepustakaan, terdiri atas tinjauan teoritis yang memuat model pembangunan kolaboratif berdasarkan sudut pandang para ahli, *stakeholders*, pembangunan ekonomi, dan pembangunan kawasan perbatasan; peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai RPJMN Tahun 2020-2024, *grand disain* Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024, rencana strategis Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan tahun 2020-2024, Renduk pengelolaan BWN-KP tahun 2020-2024, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara; dan Indeks Pengelolaan Perbatasan (IPKP); dan
3. Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

Kawasan Perbatasan Laut, terdiri atas tahapan pengolahan dan analisis data yang memuat hasil identifikasi dan Analisa potensi dan masalah di PKSN kawasan perbatasan laut, dan hasil IPKP sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan; dan pendekatan model pembangunan kolaboratif yang memuat *stakeholders* yang berperan, pendekatan leveling, dan pendekatan alur proses.

Berikut bagian dari kegiatan finalisasi model pembangunan kolaboratif dimaksud dapat diunduh melalui alamat link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1DW2sWpU5aZGoCipnFisVoz0A4JV8a5eJ?usp=sharing>

**Gambar 2.13.**

Pembahasan dan Finalisasi Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut Bersama Kementerian/Lembaga Terkait dan 8 (delapan) PKSN Kawasan Perbatasan laut

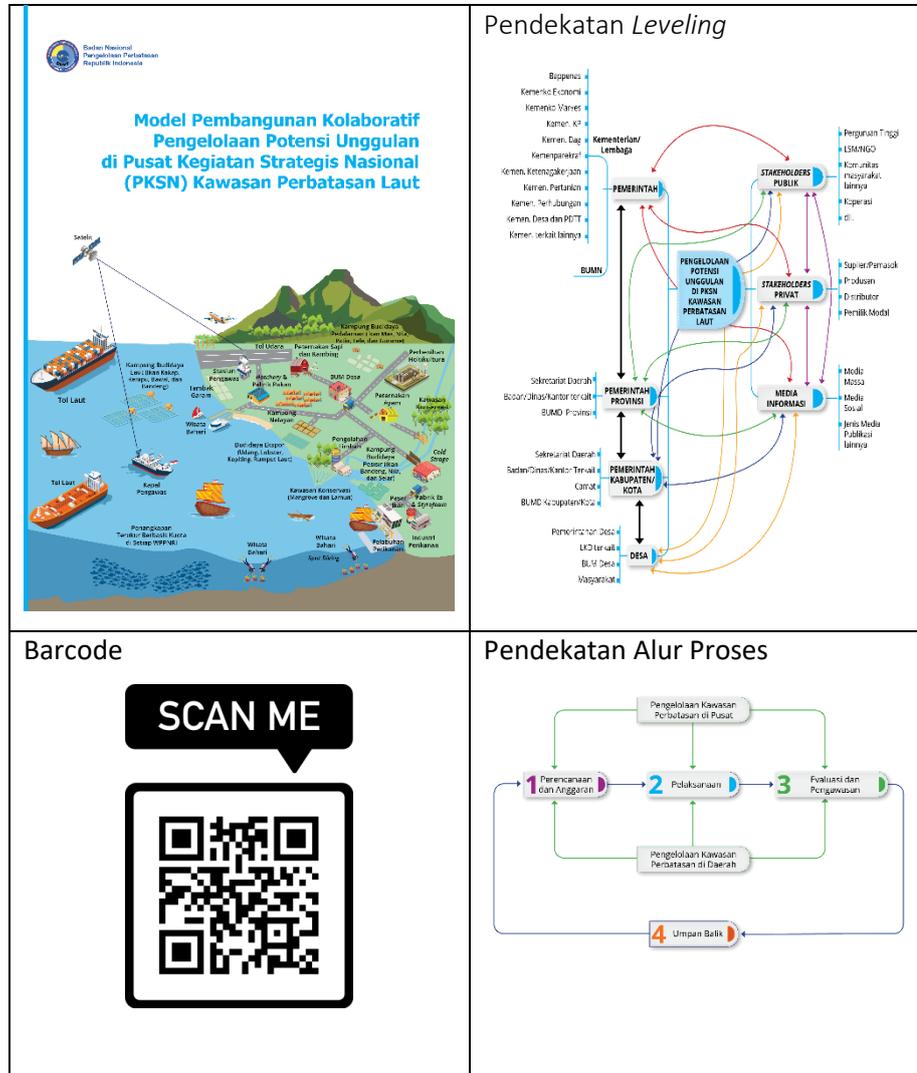


**Gambar 2.13.**

Pembahasan dan Finalisasi Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut Bersama Tim Kerja



**Gambar 2.14.**  
Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut



## 2.2. Implementasi Strategi Marketing

Suksesnya strategi marketing sektor publik dari implementasi proyek perubahan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut dilakukan dengan menggunakan *strategi marketing* sebagai berikut.

### 1. Customer

Pengguna dari Model dimaksud adalah internal BNPP terutama yang menangani pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut, Menteri/Lembaga mitra (Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Ketenagakerjaan) dan yang memiliki relasi kuat dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kawasan perbatasan laut lainnya (seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang termasuk dalam PKSN Kawasan Perbatasan Laut, PLBN dan Kecamatan LOKPRI di kawasan dimaksud.

#### 2. *Product*

Produk yang dihasilkan dari implementasi proyek perubahan ini, adalah Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut.

#### 3. *Price*

Dalam mengimplementasikan Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut perlu dukungan anggaran dari APBN dan/atau APBD kabupaten/Kota di PKSN Kawasan Perbatasan Laut yang bersangkutan dan dimungkinkan bersumber dari sumber sah lainnya.

#### 4. *Place*

Implementasi proyek perubahan dilaksanakan di 8 (delapan) PKSN Kawasan Perbatasan Laut.

#### 5. *Promotion*

Untuk mensosialisasikan produk proyek perubahan ini sebagai upaya untuk dapat segera diimplementasikan, maka dapat mengoptimalkan kegiatan yang difasilitasi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya, dan/atau melalui forum kegiatan yang difasilitasi pemerintah daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Upaya promosi dapat juga mengoptimalkan media informasi yang dimiliki oleh BNPP atau media informasi lainnya.

### **2.3. Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran**

Dalam proses implementasi proyek perubahan, telah terjadi interaksi antara anggota dalam tim kerja dan juga dengan *stakeholders*, baik

*stakeholders* internal maupun eksternal kelembagaan yang memungkinkan terjadinya transfer *knowledge* yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, dan tentunya memberi implikasi positif untuk keberlangsungan suatu organisasi.

1. Dalam proses perancangan proyek perubahan, dibutuhkan *effort* yang besar untuk menyamakan persepsi dan memperoleh gagasan yang tepat untuk dihasilkan dan memberikan manfaat yang besar dalam mensinergikan peran kementerian/Lembaga terkait.
2. Proses identifikasi potensi dan masalah yang dilakukan dalam upaya memperoleh data dan informasi eksisting terhadap perkembangan faktual di PKSN Kawasan Perbatasan Laut, memberi nilai tambah dalam menguatkan gagasan proyek perubahan tersebut untuk dinarasikan dengan data yang akurat. Dukungan Organisasi Perangkat Daerah terkait memberikan dukungan untuk dilanjutkan proses penyusunan proyek perubahan yang dilaksanakan.
3. Subtansi utama yang dibahas dalam tiap pertemuan antara Kementerian/Lembaga terkait saling memberi pengaruh positif untuk menguatkan materi yang dibangun sebagai model pembangunan kolaboratif pengelolaan potensi unggulan, hal ini menguatkan dukungan dari Kementerian/Lembaga mengenai proyek perubahan dimaksud.
4. Melalui pembelajaran pengembangan ekonomi di PKSN Bengkalis secara langsung, menghadirkan model yang sama dengan pengembangan berdasarkan kondisi lokal, dapat diunduh melalui alamat link berikut:

[https://drive.google.com/file/d/15hdgNIIPywkPqwldDDXa-vLwWGKRNTWS/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/15hdgNIIPywkPqwldDDXa-vLwWGKRNTWS/view?usp=share_link)

Hal ini menjadi pembelajaran bagi organisasi untuk mengoptimalkan sumberdaya dalam menghasilkan suatu kebijakan yang memiliki perspektif ke depan untuk lebih baik.

## **BAB III PENUTUP**

### **3.1. *Lesson Learnt***

Seluruh rangkaian proses pelaksanaan proyek perubahan diwarnai dari tiap tahapan proses pembelajaran yang diperoleh dan hal ini memberi implikasi positif yang dapat dirasakan oleh *project leader* termasuk tim kerja yang berproses bersama dalam menghasilkan proyek perubahan ini, yaitu:

1. Penyamaan persepsi dalam memahami visi dan misi organisasi

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dan mempunyai tugas dalam menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, dibutuhkan penyamaan persepsi dalam memahami visi dan misi organisasi oleh para pihak yang terlibat dalam menghasilkan proyek perubahan.

2. Komitmen yang kuat

Memiliki komitmen yang kuat untuk dapat menghasilkan proyek perubahan sesuai waktu yang telah disepakati bersama memudahkan langkah dalam melaksanakan penugasan yang harus dilaksanakan. Keterbatasan anggaran tidak menjadi hambatan dalam menyelesaikan proyek perubahan ini, dengan mengoptimalkan program dan kegiatan yang sementara dilaksanakan, justru memberi nilai tambah terhadap output yang direncanakan sebelumnya.

Komitmen yang kuat adalah nilai dasar dalam membangun kolaborasi tidak hanya sebatas bagaimana membangun hubungan antar organisasi, melainkan dimulai dari kelompok yang paling kecil.

3. Adaptif/agile terhadap perkembangan dalam pembangunan ekonomi

Menyikapi dinamika perkembangan dalam pengelolaan kawasan perbatasan laut yang juga diperhadapkan atas kondisi riil sumberdaya alam yang

melimpah, dengan segala permasalahan dan tantangan pengelolaannya, antara lain keterbatasan sarana/prasarana, masyarakat kawasan perbatasan laut yang cenderung termarginalkan, sehingga perlu kerja ekstra dengan pelibatan pihak terkait yang dibangun mengedepankan hubungan koordinasi dan menghasilkan sinergitas dalam membangun program dan kegiatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Di samping itu perkembangan teknologi informasi pun sangat dinamis, dibutuhkan penyesuaian segera agar mampu meningkatkan kapasitas diri dan organisasi

### **3.2. Kesimpulan**

1. Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Laut merupakan instrumen yang digunakan dalam keterkaitan hubungan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengawasi dan menjadi umpan balik dalam mendorong pengelolaan potensi unggulannya secara sinergis dengan pelibatan para pihak yang berpeluang menjadikan kawasan tersebut mengalami kemajuan di bidang ekonomi.
2. Proses penetapan sumberdaya potensial yang akan dikelola sebagai produk unggulan dengan memperhatikan keberlanjutan dan kesinambungannya.
3. Kolaborasi adalah teknik/cara untuk menguatkan sinergitas antar *stakeholders* dalam melaksanakan kewenangannya masing-masing, sehingga dapat memastikan setiap program dan kegiatan yang disepakati dapat dilaksanakan dan menjadi daya ungkit dalam penguatan ekonomi daerah dan memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

### **3.3. Saran**

1. Model Pembangunan Kolaboratif Pengelolaan Potensi Unggulan di PKSN Kawasan Perbatasan Laut bersifat universal/makro, belum spesifik pada kondisi lokalitas PKSN yang sangat dimungkinkan

memiliki perbedaan sumberdaya dan karakteristik wilayah yang berbeda satu dengan lainnya, sehingga ke depan perlu dikembangkan dalam detailing model per PKS Kawasan Perbatasan laut yang ada.

2. Diperlukan kejelasan hasil revidi dalam memotret sumberdaya potensial untuk dianalisis, sehingga dapat memberikan rekomendasi ketepatan terhadap kebijakan yang akan difasilitasi oleh Kementerian/Lembaga terkait secara holistik, integratif, tematik dan spasial berbasis pemangku kepentingan.
3. Diperlukan komitmen yang kuat bagi *stakeholders* secara *pentahelix*, karena dapat dimungkinkan masing-masing pihak memiliki orientasi prioritas yang berbeda. Dan seharusnya dengan berkomitmen menindaklanjuti Renduk Tahun 2020-2022 BWN-KP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 yang merupakan amanat presiden Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti dalam pemenuhan capaiannya.

- Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia On Line*, edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, Indonesia. <https://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN,
- Adisasmita, R. 2008. *Pengembangan Wilayah: Konsep Dan Teori*. Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Agranoff, Robert dan Michael McGuire. (2003), *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Washington: Georgetown University Press.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE,
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI. 2020. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*, <https://www.bappenas.go.id-PDF>
- Koespramudyo, Deddy, 2003, *Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan*, Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional Bappenas, Jakarta,
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2004-2025,
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil,
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara,

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan,

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan Peraturan perubahannya,

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar,

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan,

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan,

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah,

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu,

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang *Grand Design* Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025,

Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan,

Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi dan Pengawasan Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan,

Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan

Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan tahun 2020-2024.

## **MEDIA ONLINE**

Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2010). Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and How Do Knowledge, Innovation and the Environment Relate To Each Other? *International Journal of Social Ecology and Sustainable Development*, 1(1), 41–69, diakses 30 Oktober 2022 dari <https://doi.org/10.4018/jsesd.2010010105>

Catalyst Indonesia, Kolaborasi, diakses 30 Oktober 2022 dari <https://www.catalystindonesia.id/info/kolaborasi>

Emerson, Kirk. et.al. (2011). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory* Volume 22 dalam Konsep Kolaborasi Pemerintahan/*Collaborative Governance*, diakses 30 Oktober 2022 dari <https://123dok.com/article/konsep-kolaborasi-pemerintahan-collaborative-governance.z1d799pv>

Kenali Perbedaan Analisis SWOT dan SOAR untuk Memilih Strategi Bisnis yang Tepat <https://marksharetraining.co.id/kenali-perbedaan-analisis-swot-dan-soar-untuk-memilih-strategi-bisnis-yang-tepat/>

Mewujudkan Prinsip-Prinsip Penta -Helix Dalam Mengelola Kekayaan Negara (Studi Kasus Penataan Sungai Citarik), diakses 30 Oktober 2022 dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14311/Mewujudkan-Prinsip-Prinsip-Penta-Helix-Dalam-Mengelola-Kekayaan-Negara-Studi-Kasus-Penataan-Sungai-Citarik.html>